



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PENGATURAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PACIFIC ECONOMIC COOPERATION (KKP APEC) SEBAGAI IMPLEMENTASI DAR I PERJANJIAN KERJASAMA APEC DI INDONESIA

SKRIPSI



NUR HIDAYAT
06 140 250

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“PENGATURAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS *ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATION* (KPP APEC) SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PERJANJIAN KERJASAMA APEC DI INDONESIA”**.

Didorong oleh semangat dan keyakinan serta berserah diri kepada Allah SWT penulis berusaha menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya guna memenuhi salah satu tugas dan kewajiban melengkapi persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Dengan segala keterbatasan serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki, tentulah dalam penulisan skripsi ini menyadari akan kekurangan dan kelemahan. Dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan dan saran yang akan menyempurnakan skripsi ini.

Skripsi ini tidak mungkin terlaksana tanpa bantuan dan dorongan semangat dari pihak-pihak yang selama ini telah banyak membantu penulis. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada yang terhormat :

1. Bapak Prof. DR. Yuliandri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Yoserwan, SH, MH, LLM selaku Pembantu Dekan I, Bapak Frenadin Adegustara, SH, MH selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. Kurniawarman, SH, MH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.

3. Bapak Dr. Ferdi, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan beserta Ibu Delfiyanti, SH, MH selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Bapak Najmi, SH, MH selaku Pembimbing I dan Ibu Sri Asih Roza Nova, SH, MH selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Zainul Daulay, SH, MH selaku Penguji I dan Bapak Zulheri, SH, MH selaku Penguji II yang telah banyak memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Bapak dan Ibu karyawan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
8. Ayahanda tercinta Amirman yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini bagi penulis, sebab beliau telah memberikan seluruh kasih sayang dan nasehat-nasehat yang sangat berarti dari apapun juga, dukungan baik moril maupun materil dan perhatian serta kerelaannya dengan seikhlas-ikhlasnya untuk membimbing penulis hingga dapat menempuh Sarjana Hukum.
9. Ibunda tercinta Rosniati Hakim, M.Ag yang sangat berarti bagi penulis dalam penulisan skripsi ini, sebab beliau telah memberikan seluruh kasih sayang dan rela berkorban apapun juga demi kesuksesan anaknya dalam menempuh pendidikan serta berjuang sekuat tenaga untuk kehidupan anak-anaknya. Mama selalu memberikan do'a, semangat, dan selalu mengingatkan supaya rajin agar cepat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
10. Keluarga besar saya, kakak-kakak saya Hasan Sholihin, ST dan Hamid Muslim, L.C, serta adik-adik saya Nur Hasnah, Nur Haini, Nur Syahrina, dan Nur Firmansyah yang

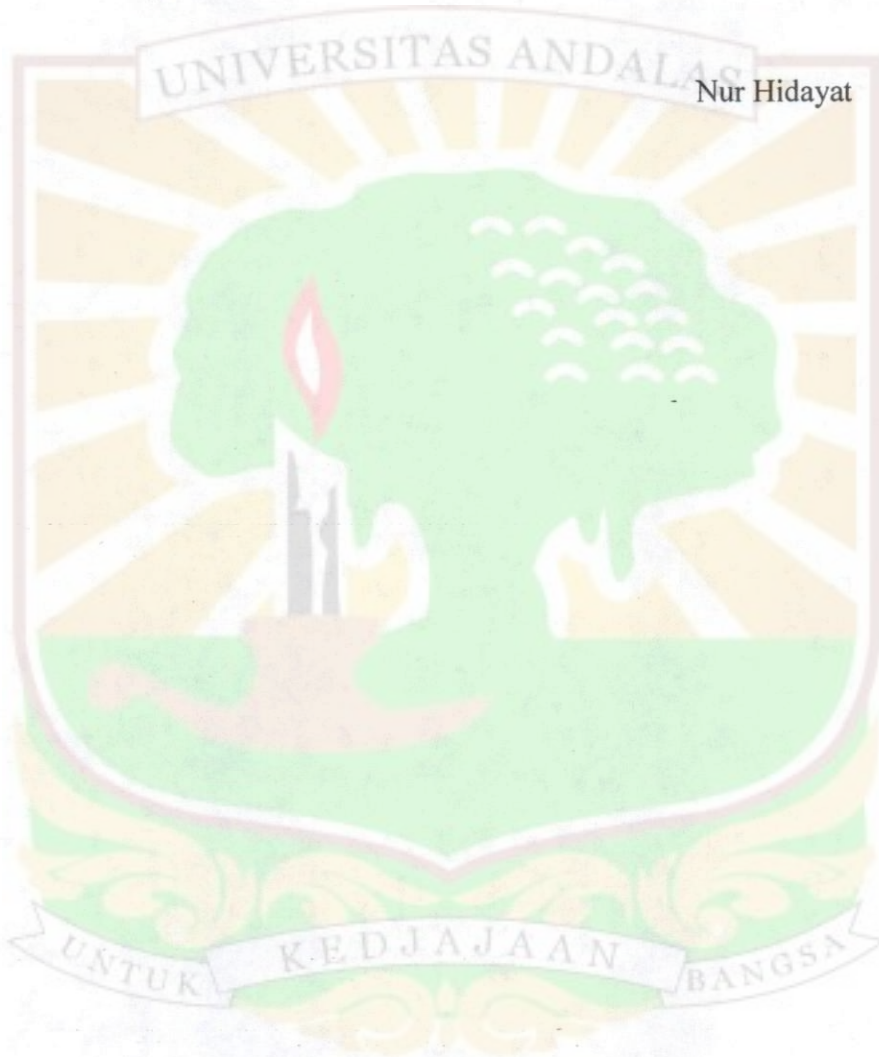
menjadi motivasi bagi saya untuk selalu memberikan contoh yang lebih baik kepada mereka, semoga mereka menjadi anak-anak yang sholeh dan sholehah, dan selalu menjadi lebih baik serta sukses dalam menempuh hidup dan kehidupan ini.

11. Febi Hidayat yang senantiasa mendampingi saya dalam proses penyelesaian skripsi ini, selalu memberi inspirasi dan semangat. Alhamdulillah, kita dapat menyelesaikan masa studi kita secara bersamaan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. *"Percayalah, Allah tidak memberi semua sia-sia diatas bumi ini, semua indah pada waktunya. ! "*. Bee Happy Wanita Surga !
12. Keluarga Besar Mentawai Surf Jati 69 (Papa Hidayat, Oom Jhon, Mama Rita, Om Dedek, Om Ade, Bg Dinand&Kak Nyanya, Bg Bayu&Kak Tessya, Bg Rio, Cici, Lulu, Kiki, Tante Mel, Om Darwis, Mas Har, Ahmad, Afif, El), LO Justicia Sport Club, Tim Bola Basket FHUA, Tamara Basketball Club Padang serta semua teman-teman angkatan 2006 di Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. MyLiverpudlian Padang (gito,marki,bowo,geri,gama,satria,gambuang,yudhi,asnil). All round the field is anfield road, we once we watch the King Kenny play (we cold he play), stevie highway the sing, we had dream and song to sing, of the glory round the field of anfield road. Liverpooll. Liverpool!! #YNWA
14. Keluarga besar Volareee Haidil Akbar 'bubu', Elsa Natalia 'kaliang', Havid Mizain 'popot'. Tiada hari tanpa truth or dare, Keluarga besar Taluak (bang don, kak gina, ncent, cyiin pangki, aal, pak cik, bang windo, isnok), terima kasih keluargaku.
15. Semua pihak yang turut membantu hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 7 Maret 2011

Penulis



ABSTRACT

International cooperation is needed to bring order, manage, and maintain relations between countries. Cooperation between countries can be poured in the shape of international organizations engaged in various fields, such as cooperation in economy and trade. One of the international cooperation in the field of economy and trade in Asia-Pacific is the Asia Pacific Economic Cooperation / APEC. This international organization is open, informal, not binding, and all policies / programs generated by meeting of heads of member States and the outcome remains in the corridors of the WTO upholds the principle of free trade between countries in the world. One of the programs and policies that resulted in the APEC Bogor Goals set out in 1994. Of the implementation of APEC cooperation agreement that refers to the Bogor Goals adopted in Business Travel Card scheme for APEC members. In this study provides a description of the settings KPP use APEC as one of the implementation of APEC cooperation agreement which provides trading facilities in order to increase the mobility of trade to and from other APEC member countries. The problems presented in this study were first, how the settings in the use of KPP APEC APEC cooperation agreement. Second, how Indonesia is implementing the use of KPP APEC. Third, the constraints faced by Indonesia in implementing the provisions concerning the use of KPP APEC. This research using normative methods and aims to see APEC as well as the implementation of KPP settings and constraints in Indonesia. Based on the research of the issues raised concluded: first, setting the use of KPP APEC refers to the seven points Bogor Goals in 1994 which gave birth to three main pillars of APEC cooperation program of trade and investment liberalization, business facilitation and economic and technical cooperation. Second, APEC KPP into force in Indonesia by the issuance of Decree of Minister of Justice and Human Rights September of 2003 and Government Regulation no. 75 years 2005. Third, the government is not maximal effort in socializing and promoting APEC KPP for citizens of Indonesia, especially for the entrepreneur / businessman became the main obstacle in implementing the APEC KPP in Indonesia so it is still at least entrepreneurs / businessmen who take advantage of KPP APEC.

Keywords: Setting, KPP APEC, Implementation, APEC, Indonesia.

ABSTRAK

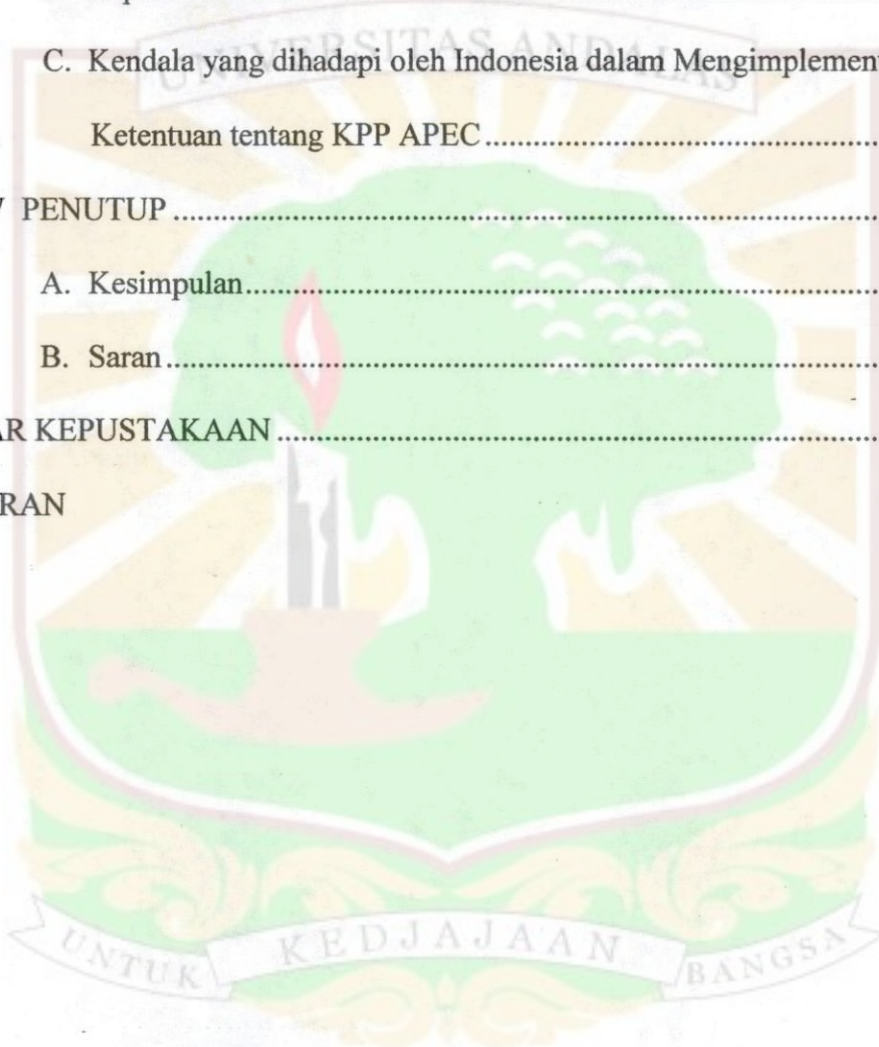
Kerjasama internasional sangat dibutuhkan untuk menertibkan, mengatur, dan memelihara hubungan antar negara. Kerjasama antar negara dapat dituangkan dalam wujud organisasi internasional yang bergerak diberbagai bidang, seperti kerjasama dibidang ekonomi dan perdagangan. Salah satu kerjasama internasional yang bergerak dibidang ekonomi dan perdagangan dikawasan Asia-Pasifik adalah *Asia Pacific Economic Cooperation/APEC*. Organisasi internasional ini bersifat terbuka, informal, tidak mengikat, dan semua kebijakan/program yang dihasilkan berdasarkan pertemuan kepala Negara anggotanya dan hasilnya tetap berada dalam koridor WTO yang menjunjung prinsip perdagangan bebas antar Negara-negara di dunia. Salah satu program dan kebijakan yang dihasilkan dalam APEC dituangkan dalam *Bogor Goals* tahun 1994. Wujud implementasi perjanjian kerjasama APEC yang mengacu pada hasil *Bogor Goals* diterapkan dalam skema Kartu Perjalanan Pebisnis bagi negara anggota APEC. Dalam penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengaturan penggunaan KPP APEC sebagai salah satu implementasi perjanjian kerjasama APEC yang memberikan fasilitas dalam perdagangan agar dapat meningkatkan mobilitas perdagangan dari dan ke negara anggota APEC lainnya. Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimanakah pengaturan penggunaan KPP APEC dalam perjanjian kerjasama APEC. *Kedua*, bagaimanakah Indonesia mengimplementasikan penggunaan KPP APEC. *Ketiga*, kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan tentang penggunaan KPP APEC. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bertujuan untuk melihat pengaturan KPP APEC serta implementasi dan kendalanya di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang dikemukakan disimpulkan: *pertama*, pengaturan penggunaan KPP APEC mengacu pada poin ketujuh *Bogor Goals* tahun 1994 yang melahirkan 3 pilar utama dalam program kerjasama APEC yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis, serta kerjasama ekonomi dan teknik. *Kedua*, KPP APEC mulai diberlakukan di Indonesia dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM September tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah no. 75 tahun 2005. *Ketiga*, tidak maksimalnya upaya pemerintah dalam mensosialisasikan dan mempromosikan KPP APEC bagi warga negara Indonesia terutama bagi pengusaha/pebisnis menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan KPP APEC di indonesia sehingga masih sedikitnya pengusaha/pebisnis yang memanfaatkan KPP APEC.

Kata kunci: Pengaturan, KPP APEC, Implementasi, APEC, Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRACT.....	ii
ABSTRAK.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional.....	18
a. Pengertian dan istilah Perjanjian Internasional.....	18
b. Efektivitas perjanjian kerjasama internasional dalam bidang perekonomian dan perdagangan di beberapa kawasan dunia	27
B. Tinjauan Umum tentang organisasi APEC.....	40
a. Latar belakang lahirnya kerjasama APEC.....	40
b. Susunan keanggotaan organisasi APEC.....	44
c. <i>APEC Economis Leaders Meeting (AELM)</i> sebagai Dasar Pembentukan Program Kerjasama APEC.....	46
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama APEC	51

a. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama APEC	51
b. Deklarasi Bogor (<i>Bogor Goals</i>) sebagai pilar utama perjanjian kerjasama APEC	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Pengaturan KPP APEC dalam perjanjian kerjasama APEC	59
B. Implementasi KPP APEC di Indonesia	64
C. Kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam Mengimplementasikan Ketentuan tentang KPP APEC	74
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79
DAFTAR KEPUSTAKAAN	80
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Salah satu cara untuk menghindari terjadinya perselisihan pada masyarakat Internasional, maka dibutuhkan adanya kerjasama antar negara. Kerjasama ini juga dibutuhkan untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antar negara.

Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian maupun dalam bentuk mendirikan sebuah organisasi Internasional dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama dalam segala bidang, seperti politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan ekonomi.

Dalam perkembangan sejarah hubungan internasional, perjanjian yang dilakukan antara negara mempunyai peranan yang sangat mendasar apalagi perjanjian itu sendiri merupakan sumber hukum internasional dan sekaligus sebagai cara bagi semua negara untuk mengembangkan kerjasama yang damai apapun sistem sosial atau konstitusinya.

Perjanjian Internasional merupakan sesuatu yang penting dalam hubungan internasional sehingga merupakan salah satu sumber hukum formil hukum Internasional. Kedudukan tersebut dikarenakan praktek-praktek negara saat ini telah mengatur beragam persoalan dan hubungan antara mereka dengan mempergunakan perjanjian-perjanjian Internasional, sehingga menjadi jelaslah pentingnya perjanjian-perjanjian Internasional. Masyarakat internasional

kemudian melihat kebutuhan untuk membuat kodifikasi hukum internasional tentang perjanjian internasional. Upaya kodifikasi tersebut menghasilkan tiga instrumen hukum perjanjian Internasional yang penting, yaitu :

1. Konvensi Wina 1969, tentang hukum perjanjian internasional umum.
2. Konvensi Wina 1978, tentang suksesi negara yang menghormati perjanjian internasional.
3. Konvensi Wina 1986, tentang hukum perjanjian internasional antara negara dengan organisasi Internasional atau organisasi Internasional satu sama lain.

Perjanjian internasional menjadi instrument penting dalam mewujudkan kerjasama antarnegara dalam berbagai bidang seperti halnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan baik yang dilakukan oleh negara dan maupun organisasi internasional.

Pada masa globalisasi sekarang dimana dibukanya era perdagangan bebas yang mengharuskan semua negara didunia harus bergerak aktif dalam perdagangan dunia dan berbenah diri memperbaiki perekonomian negaranya, agar tidak semakin tertinggal dari negara-negara lain, dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, serta kondisi perekonomian dunia yang semakin bebas dan terbuka.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka timbul inisiatif dari negara-negara di dunia yang mempunyai visi dan misi, serta pandangan yang sama dalam meningkatkan perekonomian negaranya yaitu dengan melakukan kerjasama

ekonomi. Adapun bentuk kerjasama ekonomi yang dapat dilakukan antara lain adalah:

1. Kerjasama bilateral atau disebut juga perjanjian *bipartite* yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh dua negara.
2. Kerjasama multilateral (*multipartite*) yaitu kerjasama yang dilakukan oleh lebih dari 2 negara.
3. Kerjasama regional yaitu perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Negara-negara yang berada dalam satu kawasan atau regional.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan menjadi sebuah forum himpunan bagi negara-negara yang mempunyai satu pandangan, visi dan misi, serta kesamaan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, seperti contoh ASEAN (himpunan negara-negara asia tenggara), MEE (forum masyarakat ekonomi eropa).

Selain itu, kerjasama antarnegara tersebut juga dituangkan dalam sebuah wadah permanen untuk mencapai sebuah tujuan bersama yang disebut organisasi internasional, seperti contoh OPEC (organisasi negara-negara pengeksport minyak), NATO (organisasi dalam bidang pertahanan negara-negara atlantik utara), APEC (organisasi internasional negara kawasan Asia-Pasifik).

Organisasi internasional timbul dan berkembang karena semakin meningkatnya hubungan internasional yang semakin kompleks dalam berbagai bidang, salah satunya dalam bidang ekonomi. Menurut Boer Mauna, organisasi internasional ialah suatu himpunan negara-negara yang merdeka yang bertujuan

untuk mencapai kepentingan bersama melanggar organ-organ dari perhimpunan itu sendiri.¹

Organisasi internasional dalam bidang ekonomi timbul berdasarkan atas kepentingan bersama oleh Negara-negara yang memiliki pandangan serta visi dan misi yang sama dalam meningkatkan pembangunan perekonomian negaranya agar dapat menyesuaikan dengan kondisi perekonomian dunia yang semakin berkembang dengan pesat.

Pembangunan ekonomi merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh suatu negara untuk meningkatkan taraf hidup ekonomi rakyat di setiap negara. Seperti yang dikatakan Todaro “Pembangunan yang didasarkan pada kemandirian diri sendiri melalui isolasi sebagian atau keseluruhan, dianggap sebagai pembangunan yang secara ekonomis kurang baik dibandingkan dengan pembangunan yang mengikut sertakan diri kedalam perdagangan yang bebas dan tidak terbatas”.²

Dalam rangka melakukan perbaikan ekonomi negara-negara di dunia, terutama oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia-Pasifik, maka dibentuklah sebuah wadah kerjasama³ dalam wujud sebuah organisasi Internasional yang bergerak dalam bidang perekonomian yaitu APEC⁴ (*Asia Pasific Economic Cooperation*).

¹ Boer Mauna, *Organisasi-Organisasi Internasional*, Badan Litbang Departemen Luar Negeri, 1998, hlm 5.

² Michel Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm 27.

³ Kerjasama merupakan salah satu prinsip dalam hukum internasional

Pasal 1 ayat 3 Piagam PBB, “...to achieve internasional cooperation insolving...”

⁴ Selanjutnya, penulis menggunakan istilah APEC untuk menyatakan *Asia Pasific Economic Cooperation*

APEC adalah forum kerjasama ekonomi yang terbuka, informal, tidak mengikat dan tetap berada dalam koridor disiplin WTO dan berbagai perjanjian Internasional, dibentuk di Canberra November 1989. Keanggotaan APEC terdiri 21 negara ekonomi yang berada di kawasan Asia Pasifik. APEC merupakan forum yang terbentuk dan perkembangannya dipengaruhi antara lain oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepat di Uni Soviet dan Eropa Timur, kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay yang akan menimbulkan proteksionisme dengan munculnya kelompok regional serta timbulnya kecenderungan saling ketergantungan diantara negara-negara di kawasan Asia Pasifik.

Forum yang dibentuk tahun 1989 di Canberra-Australia ini memiliki visi “Mewujudkan komunitas ekonomi Asia-Pasifik yang berdasarkan pada semangat keterbukaan dan kemitraan, serta upaya kerjasama untuk menghadapi tantangan perubahan, pertukaran barang, jasa dan investasi secara bebas, pertumbuhan ekonomi yang luas serta standar kehidupan dan pendidikan yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang berkesinambungan memperhatikan aspek-aspek lingkungan”, telah melaksanakan langkah besar dalam menggalang kerjasama ekonomi sehingga menjadi suatu forum konsultasi, dialog dan sebagai lembaga informal yang kerjasama ekonominya berpedoman melalui pendekatan liberalisasi bersama berdasarkan sukarela, melakukan inisiatif secara kolektif dan untuk mendukung keberhasilannya dilakukan konsultasi yang intensif terus menerus diantara 21 ekonomi anggota. Pada awalnya terdapat 12 negara sebagai pendiri yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat.

Sejak saat itu telah menjadi wahana utama di kawasan Asia Pasifik dalam meningkatkan keterbukaan dan praktek kerjasama ekonomi sehingga dapat menarik masukan beberapa negara yaitu Republik Rakyat China, Hongkong-Cina dan Chinese-Taipe untuk bergabung pada 1991 yang kemudian disusul masuknya Meksiko dan Papua New Guinea tahun 1993 serta Chili pada 1994. Sedangkan tiga ekonomi anggota terakhir yaitu Federasi Rusia, Peru dan Vietnam bergabung dalam forum APEC tahun 1998. Serangkaian upaya penguatan infrastruktur forum kerjasama APEC terus diintensifkan kerjasamanya sehingga forum tersebut menjadi lebih kuat dan tangguh di kawasan. Forum ini sangat diharapkan tetap menjadi pelopor dalam pelaksanaan putaran uruguay untuk mencapai sistem perdagangan yang adil, terbuka dan transparan untuk mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional dan global.

Mengingat pentingnya peranan APEC dalam rangka memberikan dukungan terhadap sistem perdagangan dimaksud dalam menunjang pertumbuhan ekonomi regional dan global di kawasan Asia-Pasifik, maka Para Pemimpin Ekonomi APEC telah mengesahkan sejumlah Deklarasi yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang signifikan terhadap perkembangannya antara lain mengenai VISI APEC, *Bogor Goals*, *Osaka Actions Agenda (OAA)* yang memberikan arahan atau pedoman kerjasama APEC, dan tahun 1996 meluncurkan fase implementasi daripada OAA dalam bentuk MAPA (*Manila Action Plans For APEC*). Sedangkan tindakan konkrit lain yaitu berupa implementasi Rencana Aksi Kolektif (RAK) maupun Rencana Individu (RAI) oleh seluruh anggotanya sehingga penjabaran secara keseluruhan terhadap langkah-langkah implementasi dalam melakukan liberalisme ekonominya merupakan cermin yang kuat dalam

mewujudkan kearah sistem perdagangan dan investasi bebas dan terbuka tahun 2010/2020 untuk ekonomi maju dan berkembang APEC.

Pada hasil pertemuan para Kepala Negara/Pemimpin APEC di Sydney yang mengacu pada tiga pilar kerjasama APEC berdasarkan Deklarasi Bogor (*Bogor Goals*) pada tahun 1994 di Bogor yaitu liberalisasi, fasilitasi perdagangan dan investasi (lebih dikenal sebagai pilar TILF (*Trade and Investment Liberalization and Facilitation*)), khususnya terkait dengan bidang fasilitasi perdagangan dan investasi adalah mengenai fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*). Di dalam forum APEC, fasilitasi perdagangan merupakan salah satu program kerja APEC di bawah *Committee on Trade and Investment* (CTI) sebagai salah satu prioritas. Program kerja yang telah disepakati dalam bidang fasilitasi perdagangan adalah pengembangan skema APEC *Bussines Travel Card* (ABTC)/ KPP APEC⁵.

KPP APEC adalah salah satu upaya forum APEC di bidang fasilitasi perdagangan untuk memberikan kemudahan mobilitas bisnis bagi para pengusaha di negara/ekonomi anggota forum APEC. Dengan memiliki KPP APEC, para pengusaha tidak perlu lagi mengajukan visa ke perwakilan negara/ekonomi anggota APEC mengingat kartu KPP APEC tersebut berfungsi sebagai visa elektronik dan menikmati fasilitas *multiple short-entry* ke 17 negara/ekonomi anggota APEC selama 3 tahun. Ketujuh belas negara/ekonomi anggota APEC yang saat ini memanfaatkan fasilitas KPP APEC adalah Australia, Brunei Darussalam, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia,

⁵ Selanjutnya, penulis menggunakan istilah KPP APEC untuk menyatakan *APEC Bussines Travel Card*(ABTC)

Selandia Baru, Singapura, Papua Nugini, Peru, Filipina, China Taipeh, Thailand, dan Vietnam.

Penggunaan terhadap KPP APEC ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diatur oleh hukum internasional terutama prinsip-prinsip perdagangan bebas yang telah menjadi pedoman bagi Negara-negara didunia dalam melakukan hubungan ekonomi internasional, yaitu:

1. Prinsip *Most Favoured Nation (MFN Principle)*

Prinsip ini diatur dalam Pasal I ayat (1) GATT 1947, yang berjudul General Favoured Nation Treatment, merupakan prinsip Non Diskriminasi terhadap produk sesama negara-negara anggota WTO. Menurut Pasal I ayat (1) GATT, mengharuskan perlakuan MFN atas semua konsesi tarif yang diperjanjikan yang menyatakan bahwa prinsip ini, adalah apabila suatu negara pertama (pengimpor) memberikan kemudahan atau fasilitas perdagangan internasional kepada negara kedua (pengekspor), maka kemudahan serupa harus pula diberikan kepada negara ketiga, keempat, dan seterusnya (pengekspor lainnya). Dengan kata lain, suatu negara yang memberikan keuntungan kepada negara yang satu, wajib menyebarluaskan keuntungan yang serupa kepada negara lainnya, asalkan negara-negara tersebut sama-sama berada dalam satu free trade area (FTA), misalnya antara sesama negara-negara anggota AFTA, dan produk diimpor tersebut adalah barang yang serupa.

2. Prinsip National Treatment (NT Principle)

Prinsip ini diatur dalam Pasal III GATT 1947, berjudul National Treatment on International Taxation and Regulation. Prinsip ini menyatakan bahwa, *“this standard provides for inland parity that is say equality for treatment between nation and foreigners”*. Dengan demikian, prinsip ini merupakan prinsip non diskriminasi antar produk dalam negeri dengan produk serupa dari luar negeri. Artinya, apabila suatu produk impor telah memasuki wilayah suatu negara karena diimpor, maka produk impor itu harus mendapat perlakuan yang sama, seperti halnya perlakuan pemerintah terhadap produk dalam negeri yang serupa (produk lokal). Prinsip ini dipergunakan, dengan maksud untuk menciptakan harmonisasi dalam perdagangan internasional agar tidak terjadi perlakuan yang diskriminatif antara produk domestik dan produk impor, artinya kedua produk tersebut harus mendapatkan perlakuan yang sama.

3. Prinsip Resiprositas (*Reciprocity*), Pasal II GATT 1947

Prinsip ini mensyaratkan adanya perlakuan timbal balik di antara sesama negara anggota WTO dalam kebijaksanaan perdagangan internasional. Artinya, apabila suatu negara, dalam kebijaksanaan perdagangan internasionalnya menurunkan tarif masuk atas produk impor dari suatu negara, maka negara pengekspor produk tersebut wajib juga menurunkan tarif masuk untuk produk dari negara yang pertama tadi. Berdasarkan prinsip ini diharapkan setiap negara secara timbal balik saling memberikan kemudahan bagi lalu lintas barang dan jasa. Dengan demikian, pada akhirnya diharapkan setiap negara akan saling menikmati hasil perdagangan internasional yang lancar dan bebas.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar bagi Negara-negara anggota APEC dalam memanfaatkan penggunaan KPP APEC bagi Negara anggota APEC. Dengan menggunakan KPP APEC, memungkinkan bagi semua Negara anggota APEC untuk dapat dengan bebas melakukan segala macam kegiatan ekonomi dari dan ke negara anggota APEC lainnya tanpa adanya hambatan dan aturan-aturan yang memberatkan bagi sesama Negara anggota APEC yang menggunakan KPP APEC.

Di Indonesia mulai memberlakukan KPP APEC sejak 1 Mei 2004 sesuai dengan **Surat Keputusan Menteri September 2003**. Peraturan Pemerintah dalam pelaksanaan KPP APEC untuk warga negara Indonesia adalah **Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2005** yang diterbitkan pada Desember 2005.

Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian (Doklanvisfaskim) Ditjen Imigrasi Djoni Muhammad menjelaskan, "KPP APEC adalah sejenis kartu untuk para pebisnis dan PNS eselon I. Dengan ABTC, mereka mendapatkan kemudahan keluar-masuk negara-negara APEC tanpa harus mengurus visa berkali-kali". Masa berlaku kartu tersebut tiga tahun seperti visa, sehingga pemegang ABTC akan bisa berada di sebuah negara APEC selama 60 hari. "Pebisnis akan menghemat waktu. Mereka tidak perlu memohon visa atau izin masuk lagi ke kedubes atau perwakilan negara. Pebisnis cukup menunjukkan KPP APEC dan paspor dalam proses keimigrasian di bandara. "Ketika sampai ke negara tujuan, para pebisnis juga tidak perlu antre panjang. Sebab, sudah ada *counter* khusus yang melayani," kata Djoni.⁶

⁶ Djoni Muhammad, "*Imigrasi Sosialisasikan ABTC*", Jawa Pos, 18 Desember 2009

Indonesia sebagai salah satu negara anggota APEC mendapatkan banyak keuntungan dengan ikut bergabung kedalam APEC, termasuk program KPP APEC sebagai fasilitasi perjalanan bisnis bagi negara-negara anggota APEC dan memberikan kemudahan bagi setiap pebisnis dalam proses kepabeanan.

Bagi Indonesia, APEC memiliki makna yang sangat penting. “ Pada tahun 2006 total perdagangan Indonesia ke negara anggota APEC berjumlah sekitar US\$ 98,34 milyar atau 66,78 persen dari total perdagangan Indonesia. Selain itu, 47,25 persen persetujuan penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia berasal dari investor di 16 ekonomi APEC”.⁷

Besar atau kecilnya dampak kerjasama APEC akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi negara anggotanya dalam era perdagangan bebas sekarang khususnya penggunaan KPP APEC sebagai fasilitasi perdagangan bagi pebisnis-pebisnis negara anggota APEC khususnya bagi perekonomian Indonesia.

KPP APEC sebagai fasilitas perdagangan dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama APEC di Indonesia memberikan kemudahan mobilitas bisnis bagi para pengusaha di negara/ekonomi anggota forum APEC. Dengan memiliki KPP APEC, para pengusaha tidak perlu lagi mengajukan visa ke perwakilan negara/ekonomi anggota APEC mengingat KPP APEC tersebut berfungsi sebagai visa elektronik dan menikmati fasilitas *multiple short-entry* ke 17 negara/ekonomi anggota APEC selama 3 tahun.

⁷ Pidato Hassan Wirajuda, 2007, “Dialog Pemerintah-Swasta untuk Mendorong Fasilitasi Perdagangan dalam Kerangka APEC”, Hotel Borobudur, Jakarta, diupdate dari www.deplu.go.id, diakses pada tanggal 12 Desember 2010

Berangkat dari keterangan diatas penulis berminat untuk mengkaji lebih dalam dan ilmiah untuk mengetahui pengaruh itu dengan memilih judul **“PENGATURAN KARTU PERJALANAN PEBISNIS ASIA PASIFIC ECONOMIC COOPERATION SEBAGAI IMPLEMENTASI DARI PERJANJIAN KERJASAMA APEC DI INDONESIA”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan KPP APEC dalam perjanjian kerjasama APEC?
2. Bagaimanakah Indonesia mengimplementasikan ketentuan KPP APEC?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan KPP APEC?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan KPP APEC dalam perjanjian kerjasama APEC.
2. Untuk mengetahui implementasi KPP APEC di Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan ketentuan KPP APEC.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang diadakan diharapkan akan memberi manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi dan menambah sumber ataupun referensi bacaan tentang pengaturan penggunaan KPP APEC dalam mengimplementasikan perjanjian kerjasama APEC di Indonesia.

2. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dalam menerapkan ilmu secara teoritis di bangku perkuliahan dan memberikan informasi bagi segenap *civitas academica* terutama bagi yang mendalami hukum internasional yang akan mengambil penulisan hukum mengenai implementasi perjanjian kerjasama APEC di Indonesia khususnya tentang pengaturan penggunaan KPP APEC.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan karya tulis ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁸

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:⁹

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm 13-14.

⁹ Ibid, hlm 14.

Pada tahapan penelitian normatif ini, peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat *trial and error* (percobaan dan kesalahan). Bahkan dapat dikatakan, studi kepustakaan merupakan separuh dari keseluruhan aktivitas penelitian itu sendiri, *six hours in library save six month in field or laboratory* (6 jam di perpustakaan, mempunyai kesamaan dengan melakukan penelitian 6 bulan di lapangan atau di laboratorium).¹⁰

Berdasarkan fungsi kepustakaan, dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:¹¹

1. acuan umum, yang berisi konsep-konsep, teori-teori, dan informasi lain yang bersifat umum, misalnya: buku-buku, indeks, ensiklopedia, farmakope, dan sebagainya;
2. acuan khusus, yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti, misalnya: jurnal, laporan penelitian, bulletin, tesis, disertasi, brosur dan sebagainya.

2. Jenis Data

Penelitian yang penulis buat ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersumber pada data sekunder. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a) Bahan hukum primer adalah:

- Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Vienna Convention On The law Of Treaties 1969)
- Peraturan pemerintah No. 75 tahun 2005

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 112.

¹¹ Ibid, hlm 113.

- Surat Keputusan Menteri tahun 2003 tentang Pemberlakuan *APEC Business Travel Card* (ABTC)/KPP APEC di Indonesia.
- Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 tahun 2004 tentang tata Cara Penerbitan Dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pasific Economic Cooperation*, pelaksanaan dan Pembatalan *Pre Clearence*, serta pelayanan keimigrasian Di tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- b) Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, karya ilmiah, artikel media masa atau jurnal hukum serta penelusuran informasi melalui internet.
- c) Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder mencakup kamus dan ensiklopedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Agar didapat hasil yang baik, maka perlu didukung dengan tersedianya data yang cukup dan akurat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, buku-buku, majalah, tesis, makalah dan sebagainya, yang peneliti temukan pada:

1. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Buku-buku, majalah, dan literatur hukum koleksi pribadi penulis

4. Metoda Pengolahan dan Analisis Data

Adapun pengolahan dan Analisis data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literature hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.¹²

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap tulisan ini, maka disini akan diuraikan secara garis besar dan sistematis mengenai hal-hal yang akan diuraikan lebih lanjut.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dibahas tentang latar belakang masalah, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bagian ini dibahas tentang Tinjauan umum tentang konsepsi perjanjian internasional, organisasi internasional, latar belakang lahirnya kerjasama APEC, susunan keanggotaan APEC, sektor-

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian...., Op.cit*, hlm 22-25.

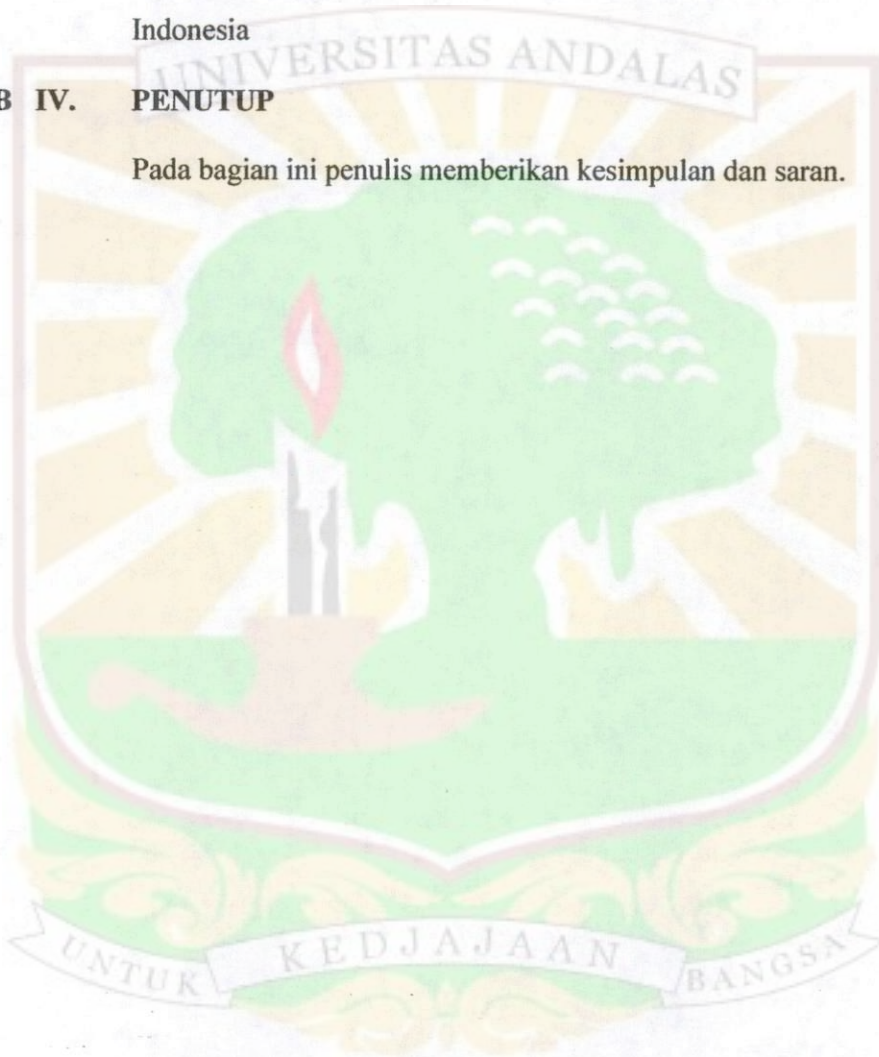
sektor kerjasama yang akan dicapai APEC, dan ABTC sebagai program APEC dalam fasilitasi perdagangan.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas tentang implementasi perjanjian kerjasama APEC menyangkut penggunaan ABTC dan kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan pengaturan penggunaan ABTC di Indonesia

BAB IV. PENUTUP

Pada bagian ini penulis memberikan kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional

a. Pengertian dan Istilah Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh subjek-subjek hukum internasional dan bertujuan untuk melahirkan akibat-akibat hukum tertentu. Contoh perjanjian internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh negara dengan negara lain, negara dengan organisasi internasional, organisasi internasional dengan organisasi internasional lain, serta Tahta Suci dengan negara.

Dalam Konvensi Wina 1969 pasal 2 dijelaskan, perjanjian internasional (*Treaty*) adalah: "Suatu Persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya."

UU No 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah RI dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subjek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah RI yang bersifat hukum publik.

Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pasal 1 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yaitu:

perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apapun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik”.

Menurut Pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional, Perjanjian Internasional merupakan salah satu sumber hukum Internasional. Perjanjian internasional yang diakui oleh pasal 38 (1) Piagam Mahkamah Internasional hanya perjanjian – perjanjian yang dapat membuat hukum (*Law Making Treaties*).

Menurut Oppenheim, perjanjian internasional adalah persetujuan yang bersifat kontraktual antar negara atau organisasi Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban secara bagi para pihak.¹³ Dr. B. Schwarzenberger menyebutkan Perjanjian internasional adalah persetujuan antara subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Adapun subjek hukum yang dimaksud adalah lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perjanjian internasional merupakan hukum terpenting bagi hukum internasional positif. Hal ini disebabkan karena lebih menjamin kepastian hukum. Kedudukan perjanjian internasional juga dianggap sangat penting karena selain perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum, perjanjian internasional diadakan secara tertulis, dan juga

¹³ Oppenheim. L, *International law*, Vol. I eight edition, Longmans, Green and CO, London-New York, 1968, hal. 877

karena perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama diantara para subjek hukum internasional dalam perjanjian internasional dikenal beberapa istilah. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Traktat (*treaty*) adalah perjanjian yang paling formal yang merupakan persetujuan dari dua negara atau lebih. Perjanjian ini menitikberatkan pada bidang politik dan bidang ekonomi.
2. Konvensi (*convention*) adalah persetujuan formal yang bersifat multilateral, dan tidak berkaitan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (*high policy*).
3. Deklarasi (*declaration*) adalah perjanjian internasional yang berbentuk traktat, dan dokumen tidak resmi.
4. *Convenant* adalah anggaran dasar Liga Bangsa-Bangsa (LBB).
5. *Charter* adalah suatu istilah yang dipakai dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.
6. Pakta (*Pact*) adalah suatu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus (Pakta Warsawa).
7. Protokol (*Protocol*) adalah suatu dokumen pelengkap instrumen perjanjian internasional, yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausul-klausul tertentu.

¹⁴ *Bentuk dan Nama Perjanjian Internasional*, diupdate dari <http://miftahur.com/bentuk-dan-nama-perjanjian-internasional> diakses pada tanggal 30 Mei 2010

8. Persetujuan (*Agreement*) adalah perjanjian yang bersifat teknis dan administratif. Sifat agreement tidak seresmi traktat atau konvensi, sehingga diratifikasi.
9. Perikatan (*Arrangement*) adalah suatu istilah yang dipakai untuk masalah transaksi-transaksi yang bersifat sementara. Sifat perikatan tidak seresmi traktat dan konvensi.
10. *Modus Vivendi* adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara, sampai berhasil diwujudkan perjumpaan yang lebih permanen, terinci, dan sistematis serta tidak memerlukan ratifikasi.
11. Proses verbal adalah suatu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konferensi diplomatik atau catatan-catatan pemufakatan yang tidak diratifikasi.
12. Ketentuan penutup (*Final Act*), adalah suatu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konvensi.
13. Ketentuan umum (*General Act*) adalah traktat yang bisa bersifat resmi maupun tidak resmi.

Perjanjian antarbangsa atau yang sering disebut sebagai perjanjian internasional merupakan persetujuan internasional yang diatur oleh hubungan internasional serta ditandatangani dalam bentuk tertulis. Contoh perjanjian

internasional diantaranya adalah antarnegara atau lebih, antarorganisasi internasional atau lebih, dan antarorganisasi internasional.

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan suatu tujuan atau agreement. Bentuk perjanjian internasional yang dilakuka antarbangsa maupun antarorganisasi internasional ini tidak harus berbentuk tertulis. Dalam perjanjian internasional ini ada hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Dalam perjanjian internasional terdapat istilah subjek dan obyek. Yang dimaksud subjek perjanjian internasional adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan obyek hukum internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, terutama kepentingan ekonomi, sosial, politik, dan budaya.

Menurut Syahmin AK, perjanjian internasional mempunyai klasifikasi sebagai berikut:¹⁵

1. Klasifikasi perjanjian internasional dari segi yang mengadakan perjanjian:
 - a. Perjanjian antar negara
Perjanjian antar negara merupakan perjanjian yang paling banyak dilakukan dalam dunia internasional dari dulu hingga sekarang karena negara adalah subjek hukum internasional yang paling utama.
 - b. Perjanjian antar negara dengan subjek hukum internasional lainnya.
Seperti dengan organisasi internasional atau dengan taht suci (Vatican)

¹⁵ Syahmin AK, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi Wina 1969)*, 1985, Armico, Bandung, hlm 3.

- c. Perjanjian antara subjek hukum internasional selain negara dengan subjek hukum internasional lainnya. Seperti antara organisasi internasional dengan organisasi internasional.

G. Swarzenberger menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan antar negara, yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak.¹⁶ Perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 disebutkan juga dalam pasal 2 ayat

(1) huruf a:

"treaty" means an international agreement concluded between state in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation ("perjanjian" adalah perjanjian internasional yang disepakati antara Negara-negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, keduanya diwujudkan dalam instrumen tunggal dalam dua atau lebih instrumen terkait dan apapun penunjukkan khususnya);

Walaupun batasan dalam konvensi ini disebut negara saja, namun bukanlah berarti bahwa hanya negara saja yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional. Dalam pasal 2 ayat 1 huruf a konvensi Wina 1969:

"Treaty means an international agreement governed by international law and concluded in written form (Perjanjian adalah perjanjian internasional yang diatur oleh hukum internasional dan menyimpulkan secara tertulis dari):

- (i) *between one or more states and one or more international organizations* (antara satu atau lebih negara bagian dan satu atau lebih organisasi internasional); or
- (ii) *between international organizations, whether that agreement is embodied in a single instrument or in two or more related instrument and whatever its particular designation* (antara organisasi internasional, apakah kesepakatan yang terkandung dalam instrumen tunggal atau dalam dua instrumen terkait lebih dan apapun khususnya penunjukan)

¹⁶ Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, 1984, CV. Remadja Karya, Bandung, hlm 3.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara subjek-subjek hukum internasional (termasuk organisasi internasional didalamnya) yang menimbulkan akibat hukum yang diatur oleh hukum internasional.

Sebelum berdirinya PBB, masalah perjanjian antarnegara baik bilateral maupun multilateral, dalam perkembangan kemajuan hukum internasional masih belum dapat dikodifikasikan secara menyeluruh dan mendasar, karena itu didalam praktek pembuatan perjanjian antarnegara pada masa dahulu didasarkan pada aturan-aturan kebiasaan internasional.

Perjanjian Internasional merupakan sesuatu yang penting dalam hubungan internasional sehingga merupakan salah satu sumber hukum formil hukum Internasional. Kedudukan tersebut dikarenakan praktek-praktek negara saat ini telah mengatur beragam persoalan dan hubungan antara mereka dengan mempergunakan perjanjian-perjanjian Internasional sehingga menjadi jelaslah pentingnya perjanjian-perjanjian Internasional. Masyarakat internasional kemudian melihat kebutuhan untuk membuat kodifikasi hukum internasional tentang perjanjian internasional. Upaya kodifikasi tersebut menghasilkan tiga instrumen hukum perjanjian Internasional yang penting, yaitu :

1. Konvensi Wina 1969, tentang hukum perjanjian internasional umum.
2. Konvensi Wina 1978, tentang suksesi negara yang menghormati perjanjian internasional.

3. Konvensi Wina 1986, tentang hukum perjanjian internasional antara negara dengan organisasi Internasional atau organisasi Internasional satu sama lain.

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan suatu persetujuan (*agreement*). Bentuk perjanjian internasional yang dilakukan antarbangsa maupun antarorganisasi internasional ini tidak harus berbentuk tertulis. Dalam perjanjian internasional ini ada hukum yang mengatur perjanjian tersebut. Dalam perjanjian internasional terdapat istilah subjek dan obyek. Yang dimaksud subjek perjanjian internasional adalah semua subjek hukum internasional, terutama negara dan organisasi internasional. Sedangkan yang dimaksud dengan obyek hukum internasional adalah semua kepentingan yang menyangkut kehidupan masyarakat internasional, terutama kepentingan sosial, politik, budaya dan hubungan ekonomi. Kepentingan tersebut lahir dari perjanjian-perjanjian antarnegara sehingga menghasilkan sebuah wujud kerjasama internasional.

Konsep kerjasama pada hukum internasional sejauh merupakan bagian hukum baru tentang pemberitaan dunia, pada era kedua dan hasil sejarah dari ketentuan hukum yang sangat bervariasi, pada hukum yang sudah tidak berlaku lagi untuk mewujudkan keadilan baik secara Internasional maupun Nasional. Proses pembuatan hukum-hukum ini dimulai pada masa dahulu dengan kategori legal seperti kebenaran dan keadilan yang melibatkan mereka pada perluasan analogi atas pengaruh-pengaruh ide legal secara umum.¹⁷

¹⁷ Ibid, hlm 433.

Kerjasama dalam hukum internasional tidak terlepas dari perjanjian-perjanjian yang menjadi landasan dalam pelaksanaannya. Menurut Oppenheim-lauterpacht, perjanjian diartikan sebagai persetujuan antara subjek-subjek hukum internasional yang menimbulkan kewajiban-kewajiban yang mengikat dalam hukum internasional, dapat berbentuk bilateral maupun multilateral. Subjek-subjek tersebut dapat berupa negara-negara maupun lembaga atau organisasi internasional.¹⁸

Kerjasama Internasional di bidang hukum, berlaku setelah perang dunia ke II. Kerjasama merupakan salah satu prinsip dalam hukum Internasional. Aturan dari negara-negara untuk bekerjasama disesuaikan dengan Piagam PBB. Dalam Piagam PBB kerjasama Internasional di muat dalam pasal 1 ayat 3, yang berbunyi:¹⁹

“Mencapai kerjasama Internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional di lapangan ekonomi, sosial, budaya, atau yang bersifat kemanusiaan pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak azasi manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bangsa atau agama”.

Majelis umum PBB pada tanggal 24 Oktober 1970 telah menyetujui suatu resolusi MU PBB No. 2526 (XXV)²⁰ yang menetapkan deklarasi mengenai prinsip - prinsip hukum Internasional tentang hubungan bersahabat dan kerjasama antara semua negara.

¹⁸ Oppenheim, L., *International ...*, *Op. cit*, hlm 887.

¹⁹ Piagam PBB.

²⁰ Resolusi MU PBB 2526 (XXV) ini pada umumnya mengandung suatu pernyataan yang berisi: “*Non use of force, non aggression, non intervention, non interference, and peaceful settlement of dispute*”.

b. Efektivitas Perjanjian Kerjasama Internasional oleh Organisasi Internasional Dalam Bidang Ekonomi Dan Perdagangan Di Beberapa Kawasan Dunia

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang dibuat antara subjek-subjek hukum internasional (termasuk organisasi internasional didalamnya) yang menimbulkan akibat hukum yang diatur oleh hukum internasional.

Perjanjian yang dibuat oleh negara-negara tersebut kemudian dituangkan dalam suatu wadah perhimpunan yang bersifat permanen yaitu dalam bentuk organisasi-organisasi yang memungkinkan negara-negara tersebut untuk memperjuangkannya dan mencapai tujuannya secara bersama kemudian disebut sebagai organisasi internasional.

Organisasi internasional meliputi organisasi antar pemerintahan dan organisasi non pemerintahan. Organisasi internasional sebagai subjek dalam arti yang luas yang dimaksudkan tidak saja menyangkut organisasi yang dibentuk oleh negara-negara, tetapi juga yang dibentuk oleh badan-badan non pemerintah. Mochtar Kusuma Atmadja mengatakan bahwa organisasi Internasional seperti PBB dan ILO mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi internasional hal tersebut merupakan semacam organisasi dasarnya.²¹

Dari keterangan diatas dapat dikemukakan suatu batasan mengenai organisasi sebagai berikut:²²

²¹ Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1982, hlm 95.

²² Narsief, *Diktat Edisi Revisi Hukum Organisasi Internasional*, Fakultas Hukum Unand, 2004, hlm 3.

1. Organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu persetujuan antar pemerintah atau antar Negara.
2. Organisasi internasional adalah organisasi yang bersifat permanen berperan untuk melanjutkan fungsi-fungsinya.
3. Organisasi internasional bertujuan untuk mencapai kepentingan bersama dan diperlukan dalam rangka kerjasama, menyesuaikan dan mencari kompromi untuk meningkatkan kesejahteraan serta memecah persoalan bersama.
4. Organisasi internasional mempunyai suatu instrument yang akan memuat tujuan, struktur maupun cara-cara bekerja organisasi tersebut.

Organisasi internasional sebagai subjek dalam arti yang luas yang dimaksudkan tidak saja menyangkut organisasi yang dibentuk oleh negara-negara, tetapi juga yang dibentuk oleh badan-badan non pemerintah. Mochtar Kusuma Atmadja mengatakan bahwa organisasi Internasional seperti PBB dan ILO mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi internasional hal tersebut merupakan semacam organisasi dasarnya.²³

Menurut Leroy Bennet,²⁴ organisasi internasional itu mempunyai ciri-ciri tertentu seperti:

- a. *A Permannet organization to carry a continuing set of functions.*
(organisasi permanen yang berfungsi untuk pembangunan berkelanjutan)
- b. *Voluntary membership of eligible parties.* (Keanggotaan Sukarela dari anggota yang memenuhi syarat)

²³ Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar...*, *Op. cit*, hlm 95.

²⁴ A. Lerroy Bennet, *International Organization*, Prentice Hall. Inc, 1979, hlm 3.

- c. *Basic instrument stating goals, structure and methods of operation.* (Dasar instrumen menyatakan tujuan, struktur dan metode operasi)
- d. *A broadly representative consultative conference organ.* (Suatu organ konferensi konsultatif representative yang luas)
- e. *Permanent secretariat to carry on continuous administrative, research and information functions.* (Sekretariat Tetap untuk menjalankan penelitian berkelanjutan administratif, dan fungsi informasi)

Ditinjau dari jenis fungsinya, organisasi internasional dibedakan atas:²⁵

1. Organisasi-organisasi Kerjasama Organisasi-organisasi ini mengkoordinasikan kerjasama negara-negara anggota dalam berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan lain-lain.
2. Organisasi-organisasi pengelolaan, misalnya komisi sungai-sungai.

Organisasi internasional dibentuk melalui suatu perjanjian dari tiga negara atau lebih pihak. Suatu organisasi pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang menurut hukum dipisahkan dari setiap organisasi lainnya dan akan terdiri dari satu badan atau lebih. Badan-badan tersebut merupakan suatu kumpulan berbagai wewenang yang dikelompokkan dibawah satu nama. Adapun yang menjadi sumber hukum organisasi internasional adalah:²⁶

1. Kebiasaan yang sudah lama dilakukan
2. Instrument pokok yang dimiliki oleh organisasi internasional yang telah diratifikasi oleh semua anggotanya.

²⁵ Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar...*, *Op. cit*, hlm 19.

²⁶ Sumaryono Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1990, hlm 8.

3. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai peraturan tata tertib organisasi internasional beserta bahan-bahan yang berada dibawah naungannya, termasuk cara kerja mekanisme yang ada pada organisasi tersebut.
4. Hasil-hasil yang ditetapkan atau diputuskan oleh organisasi internasional yang wajib atau harus dilaksanakan baik oleh para anggotanya maupun badan-badan yang ada dibawah naungannya. Hasil-hasil itu dapat berupa resolusi, keputusan, deklarasi, atau rekomendasi.

Dalam pembentukan organisasi internasional, maka ada 4 aspek yang menjadi faktor terpenting, yaitu:²⁷

1. aspek filosofis merupakan aspek pembentukan organisasi internasional yang berkenaan dengan falsafah atau tema pokok suatu organisasi internasional, misalnya:
 - Tema keagamaan: Organisasi Konferensi Islam (OKI), Moeslem Brotherhood
 - Tema Perdamaian: PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa)
 - Tema Kerjasama Ekonomi: APEC
2. Aspek hukum merupakan aspek yang berkenaan dengan masalah-masalah konstitusional dan prosedural.
3. Aspek administrasi yaitu aspek yang berkenaan dengan administrasi internasional, misalnya:

²⁷ Ibid, hlm 11

- a. Adanya sekretariat tetap (*permanent headquarter*) yang pendiriannya dibuat melalui *headquarter agreement* dengan Negara tuan rumah.
 - b. Adanya pejabat sipil internasional (*international civil servants*).
 - c. Mempunyai anggaran (*budgeting*) yang diatur secara proposional.
4. Aspek struktural merupakan aspek yang berkenaan dengan permasalahan kelembagaan yang dimiliki oleh organisasi internasional, seperti suatu organisasi internasional harus memiliki:
- *Principal organs*; (Organ Utama)
 - *Subsidiary organs*; (Organ Tambahan)
 - *Commissions / committee*; (Komisi / Panitia)
 - *Sub-commissions*; (Sub-komisi)
 - *Sub-committee*; (Sub-komite)

Dapat disimpulkan bahwa, organisasi internasional mempunyai aspek-aspek yang mencakup semua faktor penting yang akan dijadikan pembahasan dalam setiap permasalahan dunia dan untuk mewujudkan kerjasama antar negara dalam hukum internasional.

Berdasarkan sejarah perkembangan dan preseden yang telah terjadi berkenaan dengan organisasi internasional, maka kedudukan organisasi internasional sebagai subyek hukum internasional tidak lagi dapat dikesampingkan. Disamping kedudukan dan fungsinya sebagai subyek hukum internasional, organisasi internasional merupakan perwujudan dari suatu bentuk

persamaan prinsip, pandangan, dan tujuan terhadap perkembangan dunia, termasuk dalam permasalahan ekonomi dunia.

Persamaan prinsip dan pandangan terhadap perekonomian dunia ini diwujudkan dalam bentuk kerjasama internasional dan ini merupakan fenomena global yang terjadi diberbagai blok-blok ekonomi dunia sebagai respon terhadap globalisasi dan perdagangan bebas atau dengan kata lain sebagai antiklimaks dari globalisasi itu sendiri.

Pembentukan blok-blok kerjasama ekonomi tersebut dapat dijumpai di Asia, Afrika, Uni Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan baik berupa kerjasama bilateral, multilateral, maupun regional. Kerjasama ekonomi regional didasarkan atas adanya persamaan prinsip dan pandangan terhadap perkembangan ekonomi baik bagi negaranya sendiri maupun bagi kawasan regionalnya agar tidak semakin tertinggal dalam perkembangan perekonomian dunia.

Persamaan pandangan dan prinsip ini yang menjadi tujuan untuk mendasari negara-negara di dunia baik secara regional maupun multilateral menyatukan visi dan misinya didalam hubungan ekonomi sehingga membentuk wadah perkumpulan yang disebut organisasi internasional dalam bidang ekonomi.

Efektivitas perjanjian kerjasama yang dihasilkan oleh organisasi internasional di beberapa kawasan dunia tergantung pada implementasinya oleh Negara-negara anggota organisasi internasional tersebut di negaranya masing-masing.

Perjanjian kerjasama yang dihimpun oleh Negara-negara yang berada dalam satu kawasan diwujudkan dalam bentuk organisasi internasional.

Organisasi internasional dalam bidang ekonomi dan perdagangan yang berdiri di beberapa kawasan dunia antara lain sebagai berikut:

1. WTO²⁸

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan/perjanjian internasional yang berisi aturan-aturan dasar tentang organisasi dan perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditanda tangani oleh negara-negara anggota.

Selain bertujuan untuk mendorong arus perdagangan antarnegara, dengan mengurangi dan menghapus berbagai hambatan yang dapat mengganggu kelancaran arus perdagangan barang dan jasa, WTO juga bertujuan untuk penyelesaian sengketa, mengingat hubungan dagang sering menimbulkan konflik-konflik kepentingan. Hasil-hasil dari perjanjian WTO memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan perdagangan internasional, diantaranya mendorong persaingan bebas dan reformasi pembangunan ekonomi, meningkatkan prediktabilitas, serta mendorong perdagangan yang lebih terbuka secara bertahap.

Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku bagi semua negara anggota maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu Negara (lebih *predictable*).

Prinsip perdagangan yang dikembangkan oleh WTO melalui persetujuan/perjanjian-perjanjian internasional ini sangat efektif memberikan keuntungan bagi negara-negara anggota WTO untuk melakukan perubahan

²⁸ WTO dan Sistem Perdagangan Dunia, diupdate dari <http://www.depdag.go.id/WTO>, diakses tanggal 25 Januari 2011

melalui liberalisasi yang progresif, terutama negara-negara berkembang agar mampu bersaing dengan negara-negara maju. Sebagai contohnya adalah keputusan WTO sangat memberikan dampak bagi Indonesia sebagai Negara anggotanya. Salah satu Dampak keputusan WTO atas sengketa mobil nasional yaitu kebijakan Mobnas melanggar ketentuan "*Non Discrimination*" (perlakuan sama pada negara ketiga) dan "*National Treatment*" (ketentuan nasional) dari GATT serta perjanjian *Trade Related Investment Measures* (TRIMs). Dampak lain pada bulan Januari 1998, pemerintah mencabut kebijakan tentang mobnas dan pada tanggal 23 Juli 1998 DSB juga mengharuskan pemerintah segera mencabut berbagai fasilitas mobnas. Pemerintah mengeluarkan Kepres No. 20/1998 tentang pencabutan fasilitas mobnas.²⁹

2. AFTA³⁰

Area perdagangan bebas ASEAN atau AFTA merupakan suatu kerjasama regional di Asia Tenggara untuk menghapuskan trade barriers antara negara anggota ASEAN. Keanggotaan AFTA terdiri atas dua kelompok, yaitu Negara penandatangan CEPT (Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, dan Brunai Darussalam), dan Negara yang bergabung kemudian (Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos).

Dalam proses mewujudkan AFTA, para negara anggota ASEAN menuangkannya dalam beberapa perjanjian internasional. Disamping itu, selain dalam hal penghapusan dan pengurangan hambatan atas barang, pemimpin

²⁹ *Tindakan WTO terhadap Kebijakan Indonesia tentang Mobil Nasional "Timor"*, Diupdate dari <http://one.indoskripsi.com>, diakses tanggal 22 Oktober 2009

³⁰ *AFTA dan Implementasinya*, diupdate dari <http://www.depdag.go.id/afta>, diakses tanggal 25 Januari 2011

ASEAN juga menginginkan agar cakupan AFTA diperluas dengan memasukkan perdagangan jasa, bahkan masalah-masalah yang terkait dengan perdagangan, seperti investasi dan hak kekayaan intelektual.

Kerjasama antanegara ASEAN ini menjadikan negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang kebanyakan berstatus sebagai negara berkembang mampu bersaing dan tidak tertinggal jauh dari himpunan negara-negara maju di kawasan asia lainnya, dan juga kawasan eropa dan amerika.

Perkembangan AFTA semakin berjalan efektif dengan salah satu program yang dijalankan oleh AFTA adalah penghapusan biaya tariff pada 7.881 produk yang diperdagangkan di antara keenam Negara ASEAN pada hari Jumat, 1 Januari 2010. Keenam negara tersebut kini dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor pada 54.457 tipe produk dengan nol tariff di bawah *Common Effective Preferential Tariffs for ASEAN Free Trade Area* (CEPT-AFTA).³¹

3. Uni Eropa³²

Uni Eropa (UE, bahasa Inggris: *European Union* atau EU) adalah sebuah organisasi antar-pemerintahan dan supra-nasional, yang terdiri dari negara-negara Eropa, yang sejak 1 Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan atas nama tersebut di bawah *Perjanjian Uni Eropa* (yang lebih dikenal dengan Perjanjian Maastricht) pada 1992. Namun, banyak aspek dari EU timbul sebelum tanggal tersebut melalui organisasi sebelumnya kembali ke tahun 1950-an.

Organisasi internasional ini bekerja melalui gabungan sistem supranasional dan antarpemerintahan. Di beberapa bidang, keputusan-keputusan

³¹ *Ibid*.

³² *Uni Eropa*, diupdate dari http://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa, diakses tanggal 25 Januari 2011

ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat di antara negara-negara anggota, dan di bidang-bidang lainnya lembaga-lembaga organ yang bersifat supranasional menjalankan tanggung jawabnya tanpa perlu persetujuan anggota-anggotanya. Lembaga organ penting di dalam UE adalah Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa, Dewan Eropa, Mahkamah Eropa, dan Bank Sentral Eropa. Terdapat pula Parlemen Eropa yang anggota-anggotanya dipilih langsung oleh warga negara anggota.

Perjalanan UE sampai saat ini sangat efektif dan lancar sehingga menjadikan negara-negara di kawasan Eropa memiliki sebuah kekuatan besar yang mampu bersaing dengan perekonomian dunia yang selama ini dikuasai oleh Amerika Serikat. Selain itu, UE juga membuka diri untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan Negara-negara diluar Eropa seperti dengan Indonesia. Hal ini diwujudkan dalam perjanjian tentang Dokumen Kemitraan Komprehensif (*Comprehensive Partnership and Cooperation Agreement*) yang dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 14 Juli 2009.³³

Partnership and Cooperation Agreement (PCA) berisi kesepakatan RI-UE untuk meningkatkan hubungan bilateral, dan merupakan payung kerjasama antara kedua pihak. Naskah PCA terdiri atas 7 Bab dan 50 Pasal dan mencakup kerjasama dalam berbagai bidang seperti politik, sosial, ekonomi, perdagangan dan investasi. Perundingan PCA terakhir dilaksanakan di Hamburg, Jerman, 28 Mei 2007 dan dilanjutkan dengan pembicaraan jalur diplomatik tanggal 12 Juni 2007 yang menyepakati *final version* (keputusan akhir).³⁴

³³ *Kebijaksanaan Umum dan Politik Luar Negeri RI - Uni Eropa (UE)*, diupdate dari <http://www.deplu.go.id/RI-UE>, diakses tanggal 25 Januari 2011

³⁴ *Ibid*

4. North America Free Trade Area (NAFTA)³⁵

Salah satu Blok Perdagangan yang berada dikawasan benua amerika adalah NAFTA, yang merupakan blok perdagangan di Amerika Utara yang beranggotakan Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang bertujuan untuk mengadakan perdagangan bebas sesama anggotanya, guna meningkatkan kemakmuran rakyat di ketiga Negara anggotanya, namun berlakunya NAFTA di sisi lain akan memberikan dampak bagi negara-negara diluar anggota NAFTA karena NAFTA memberlakukan perdagangan yang diskriminatif dan protektif.

NAFTA, dalam usaha memaksimalkan perdagangan dan investasi, memberlakukan proteksi untuk menjaring perusahaan multinasionalini, dikenal dengan istilah "*Administered tariff to encourage investment*". Perusahaan multinasional yang memiliki pasar tujuan NAFTA, diberi pilihan untuk masuk berinvestasi di NAFTA atau bila tidak, akan ditinggal dan tidak akses pasar NAFTA. Sebagai suatu blok perdagangan yang memiliki ketentuan protektif dan diskriminatif, berlakunya NAFTA menyebabkan terjadinya perubahan struktur perdagangan dunia, dan menyebabkan terjadinya perubahan lokasi industri.

Perubahan struktur perdagangan karena proteksi dan perlakuan diskriminatif NAFTA telah menyebabkan terjadinya pemisahan pihak-pihak yang diuntungkan dengan berlakunya NAFTA dan pihak pihak yangdirugikan dan ditinggal (*being left out*), serta menyebabkan terjadinya perubahan lokasi industri.

Beberapa kebijakan yang dikeluarkan NAFTA tidak semua memberikan keuntungan bagi Negara-negara lain didunia, bahkan memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan perekonomian bagi Negara berkembang.

³⁵ Michael J. Trebillock, *NAFTA In Nutshell*, West Group, St Paul Minn, 1999, Hal 155.

Indonesia merupakan contoh lain negara mengalami kerugian akibat berlakunya ketentuan NAFTA, Indonesia dalam upaya meningkatkan perekonomian, berusaha untuk meningkatkan ekspor non migas. Bidang usaha yang marak di Indonesia adalah bidang usaha yang mengandalkan tenaga kerja murah. Bidang industri andalan adalah garmen, tekstil, elektronik, alas kaki dan boneka. Industri tekstil Indonesia mengalami kesulitan untuk mendapatkan order dari pembeli, ada sekitar 124 perusahaan tekstil yang berpotensi putus, 40 di sekitar Jakarta dan 84 di Jawa Tengah.³⁶ Produk Indonesia yang sulit untuk menembus pasar Amerika Serikat, mendorong terjadinya penurunan nilai investasi dan nilai ekspor Indonesia.

5. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)³⁷

APEC adalah singkatan dari *Asia-Pacific Economic Cooperation* atau Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC bertujuan mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Dengan kata lain APEC adalah forum utama untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi, kerjasama, perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik.

APEC adalah salah satu organisasi internasional di dunia yang beroperasi atas dasar komitmen yang tidak mengikat, dialog terbuka dan sama menghormati pandangan dari semua peserta. Tidak seperti WTO atau badan-badan perdagangan multilateral lainnya, APEC tidak memiliki kewajiban perjanjian yang diperlukan dari peserta.

³⁶ "Tinjauan Perdagangan Dunia", *Jurnal: Trade Management and Development Institute*, 2001, no. 23, hlm 1

³⁷ *Asia Pasific Economic Cooperation (APEC)*, diupdate dari www.apec.org, diakses tanggal 25 januari 2011

Keputusan yang dibuat dalam APEC yang dicapai dengan konsensus dan komitmen yang dilakukan secara sukarela. APEC memiliki 21 anggota yang disebut sebagai “*Member Economies*” yang berada disepanjang pantai kawasan Asia pasifik.

Salah satu keputusan APEC yang dihasilkan dari pertemuan pimpinan kepala Negara anggota APEC yang menjadi program APEC adalah tentang *Bogor Goals* yang berisi 3 pilar utama perjanjian kerjasama APEC yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitasi bisnis dan investasi. Hal tersebut tertuang dalam poin ketujuh *Bogor Goals*. Dalam mewujudkan program-program tersebut, APEC mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berada dalam ruang lingkup 3 pilar diatas.

Dalam bidang fasilitasi perdagangan, salah satu kemajuan yang dihasilkan oleh APEC adalah dengan pengembangan skema KPP APEC. KPP APEC adalah salah satu fasilitasi perdagangan yang dikeluarkan APEC untuk memberikan kemudahan bagi pebisnis-pebisnis Negara anggota APEC melakukan perjalanan bisnis ke semua Negara anggota APEC. Para pebisnis dapat menghemat waktu karena tidak perlu memohon visa dan izin masuk lagi di kedutaan besar atau perwakilan, karena KPP APEC sudah berfungsi sebagai visa elektronik. Para pebisnis cukup hanya menunjukkan kartu dengan paspor dalam proses keimigrasian di bandara. Pengembangan skema KPP APEC ini berjalan efektif bagi semua Negara anggota APEC dan mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Tahun 2003 tentang pemberlakuan KPP APEC sejak 1 Mei 2004.

B. Tinjauan Umum Kerjasama APEC

a. Latar Belakang lahirnya Kerjasama APEC

Kerjasama merupakan suatu keharusan bagi semua negara di dunia sekarang ini. Bagi negara berkembang, kerjasama akan memungkinkan mereka untuk mengerahkan potensi-potensi dan sumber-sumber lain yang dimiliki untuk mendorong mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Selain itu situasi hubungan ekonomi Internasional semakin mendorong negara berkembang untuk lebih meningkatkan kerjasamanya, disamping untuk memperoleh manfaat dari globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia juga untuk mampu menjalankan peran dalam perdagangan dunia.

Melihat kenyataan ini, timbul inisiatif dari Negara-negara pendiri yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat untuk membentuk sebuah forum kerjasama ekonomi yang kemudian disebut APEC.

APEC merupakan organisasi kerjasama negara-negara di kawasan Asia Pasifik di bidang Ekonomi. APEC berdiri atas gagasan Bob Hawke (Perdana Menteri Australia) pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Pada tahun 1989 APEC beranggotakan 12 negara, yaitu Australia, Amerika Serikat, Jepang, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kanada, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

Perkembangan terbentuknya APEC dipengaruhi antara lain oleh kondisi politik dan ekonomi dunia saat itu yang berubah secara cepat di Uni Soviet dan

Erupa Timur, kekhawatiran gagalnya perundingan Putaran Uruguay yang akan menimbulkan proteksionisme dengan munculnya kelompok regional serta timbulnya kecenderungan saling ketergantungan diantara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.³⁸

Pada awalnya terdapat 12 negara sebagai pendiri yaitu Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat. Sejak saat itu telah menjadi wahana utama di kawasan Asia Pasifik dalam meningkatkan keterbukaan dan praktek kerjasama ekonomi sehingga dapat menarik masukan beberapa negara yaitu Republik Rakyat China, Hongkong-Cina dan Chinese-Taipe untuk bergabung pada 1991 yang kemudian disusul masuknya Meksiko dan Papua New Guinea tahun 1993 seerta Chili pada 1994. Sedangkan tiga ekonomi anggota terakhir yaitu Federasi Rusia, Peru dan Vietnam bergabung dalam forum APEC.

Adapun tujuan awal didirikannya organisasi APEC adalah:

1. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Asia Pasifik.
2. Memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka.
3. Memberikan fokus kerjasama di bidang ekonomi.

APEC ini memiliki karakteristik yang membedakannya dari berbagai forum kerjasama ekonomi kawasan lainnya, yakni sifatnya yang tidak mengikat (*non-binding*). Berbagai keputusan diperoleh secara konsensus dan komitmen pelaksanaannya didasarkan pada kesukarelaan (*voluntarism*). Selain itu APEC juga dilandasi oleh prinsip-prinsip konsultatif, komprehensif, fleksibel, transparan, regionalisme terbuka dan pengakuan atas perbedaan pembangunan

³⁸ Latar Belakang Pembentukan APEC, diupdate dari www.apec.org, diakses tanggal 27 desember 2010

antara ekonomi maju dan ekonomi berkembang. Sejak pembentukannya, berbagai kegiatan APEC telah menghasilkan berbagai komitmen antara lain pengurangan tarif dan hambatan non tarif lainnya di kawasan Asia-Pasifik, menciptakan kondisi ekonomi domestik yang lebih efisien dan meningkatkan perdagangan secara dramatis. Visi utama APEC tertuang dalam '*Bogor Goals*' of free and open trade and investment in the Asia-Pacific by 2010 for industrialised economies and 2020 for developing economies (perdagangan bebas dan terbuka serta investasi di kawasan Asia-Pasifik tahun 2010 untuk Negara industri dan tahun 2020 untuk Negara berkembang) yang diterima dan disepakati oleh Kepala Negara dalam pertemuan di Bogor, Indonesia pada tahun 1994.³⁹

Dalam *Bogor Goals* tersebut, tertuang tiga unsur kerjasama APEC, yakni sebagai berikut:⁴⁰

- *strengthening the open multilateral trading system* (memperkuat sistem perdagangan multilateral secara terbuka)
- *enhancing trade and investment liberalization in the Asia-Pacific* (meningkatkan liberalisasi perdagangan dan investasi di Asia-Pasifik)
- *intensifying Asia-Pacific development cooperation* (mengintensifkan pengembangan Kerjasama Asia-Pasifik)

Dimasukkannya wacana mengenai kerjasama pembangunan Asia Pasifik (butir 3) merupakan inisiatif Indonesia. Tujuannya, sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Bogor, adalah untuk mendorong negara anggota APEC untuk mengembangkan sumber daya alam maupun manusia di kawasan Asia dan Pasifik

³⁹ Matthias Lutz, *The Effects of Volatility in The Terms of Trade on Output Growth*, New York, World Development 22, 1994, hlm. 1959-1975

⁴⁰ Latar Belakang Pembentukan..., *Op. cit.*

guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan pembangunan yang merata dengan mengurangi jurang ekonomi di antara para anggota APEC.

Adapun prinsip umum kerjasama APEC adalah:⁴¹

1. Menyeluruh (*Comprehensiveness*): yaitu mencakup semua hambatan terhadap sistem perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka.
2. Konsisten WTO (*WTO-consistency*): yaitu langkah liberalisasi dan fasilitasi konsisten dengan WTO.
3. Kesebandingan (*Comparability*): yaitu mewujudkan kesebandingan langkah liberalisasi dan fasilitasi yang ditempuh anggota.
4. Tidak memihak (*Non-discrimination*): yaitu hasil liberalisasi dan fasilitasi dinikmati oleh anggota maupun non-anggota APEC.
5. Transparan (*Transparency*): yaitu menjamin transparansi peraturan agar terwujud iklim usaha yang pasti.
6. *Standstil*: yaitu menahan untuk tidak menerapkan kebijakan yang menambah tingkat proteksi.
7. *Simultaneous start, Continuous Process & Differentiated Timetable*: yaitu proses liberalisasi dan fasilitasi dimulai segera, berkesinambungan dan tetap memperhatikan tingkat pembangunan masing-masing anggota.
8. Fleksibel (*Flexibility*): yaitu fleksibilitas dimungkinkan untuk menghadapi isu yang muncul dari perbedaan tingkat pembangunan masing-masing anggota.
9. Kerjasama (*Cooperation*): yaitu kerjasama ekonomi dan teknik yang mendukung liberalisasi dan fasilitasi akan ditempuh secara aktif.

⁴¹ Prinsip Umum Kerjasama APEC, diupdate dari www.wartawarga.gunadarma.ac.id diakses tanggal 17 November 2009

b. Susunan dan Keanggotaan APEC⁴²

APEC saat ini memiliki 21 anggota, kebanyakan adalah negara yang memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. APEC memiliki sekretariat yang berdomisili di Singapura.

Sekretariat APEC dibentuk pada tahun 1993. Para pegawai Sekretariat APEC terdiri atas 21 pejabat dari seluruh negara anggota ekonomi dan beberapa orang staf lokal. Sekretariat APEC dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif dengan masa tugas satu tahun dan berasal dari negara anggota ekonomi yang sedang menjadi ketua APEC.

Kelembagaan APEC didukung sepenuhnya oleh enam unit organisasi dan sub-komite dibawah koordinasi SOM (*Senior Officials Meeting*), yakni:⁴³

1. *APEC Economic Leaders Meeting* (AELM)

Merupakan pertemuan tahunan yang menentukan arah kerjasama ekonomi APEC yang dihadiri oleh kepala Negara anggota APEC.

2. *Ministerial Meeting* (MM)

Pertemuan dihadiri para Menteri Luar Negri dan Menteri Perdagangan Ekonomi untuk memutuskan suatu program kerjasama APEC.

3. *Sectoral Ministerial Meetings* (SMM)

Pertemuan para Menteri lainnya dibidang Pendidikan, energi, keuangan, pengembangan sumber daya manusia, kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi regional, usaha kecil dan menengah, industri telekomunikasi dan informasi, perdagangan dan perhubungan.

⁴² Susunan Keanggotaan APEC, diupdate dari <http://www.apec.org> dan sekretariat APEC <http://www.apecsec.org.sg> diakses tanggal 17 November 2009

⁴³ Ibid

4. *APEC Business Advisory Council (ABAC)*

Merupakan Badan permanen dari sektor bisnis dan swasta yang turut memberikan masukan dan usulan kepada Pemimpin APEC mengenai hal-hal terkait dengan agenda liberalisasi, fasilitasi perdagangan dan investasi.

5. *APEC Secretariat*

Mendukung kegiatan daripada komite dan working group serta berperan melaksanakan program APEC dan jasa pelayanan informasi lewat melalui e-mail :

6. *Senior Officials' Meeting (SOM)*

Untuk mempersiapkan pertemuan tingkat Menteri berdasarkan rekomendasi dari Menteri guna membahas implementasi kebijakan AELM dibidang : Liberalisasi perdagangan dan investasi (tarif dan non-tarif, barang dan jasa), Rencana kesepakatan sub kommite :

- a) *Sub-Commite on ECOTECH (ESC)*, membawahi kelompok infrastruktur ekonomi.
- b) *Budgeet & Management Committee (BMC)*, bertugas mengembangkan, mengadministrasikan dan memberikan masukan kepada SOM mengenai anggaran.
- c) *Committee on Trade and Investment (CTI)* : memberikan masukan terhadap masalah dibidang perdagangan dan investasi dan mengupayakan inisiatif liberalisasi dan fasilitasi dari kedua instrumen pokok kerjasama APEC yang dijabarkan dalam RAK dan RAI.

- d) *Economic Committee* (EC), kelompok gugus tugas wawasan ini mengkaji berbagai kondisi dan prospek ekonomi, mengembangkan efisiensi yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi di kawasan APEC.
- e) *Working Group* (WG), kelompok ini berfungsi untuk mengembangkan sektor atau bidang-bidang kerjasama.

c. *APEC Economic Leaders Meeting* (AELM) sebagai dasar pembentukan program kerjasama APEC

Kemajuan pesat yang telah dialami APEC sampai saat ini adalah tidak lepas dari dorongan politis langsung yang diberikan para Pemimpin Negara anggota APEC melalui *APEC Economic Leaders Meeting* (AELM) I di Blake Island, AS pada tahun 1993.

Latar belakang kronologis Rapat Pimpinan Ekonomi APEC (AELM) berawal pada bulan November 1993, ketika mantan Presiden AS Bill Clinton menetapkan praktek pertemuan Pemimpin APEC (AELM), yang membawa bersama-sama kepala negara dan perwakilan untuk menetapkan arah kebijakan strategis bagi APEC. Dalam pertemuan tersebut, para pemimpin membahas berbagai topik yang strategis, ekonomi dan perdagangan yang terkait. Pada agenda pertemuan baru-baru ini termasuk integrasi ekonomi regional. Pada akhir pertemuan, Pemimpin Ekonomi APEC menguraikan pandangan bersama para pemimpin mengenai topik-topik utama dan menetapkan arah strategis APEC untuk tahun mendatang. Sebagai tradisi, para pemimpin yang hadir berpartisipasi di foto di mana mereka berpakaian dengan kostum yang mencerminkan budaya dari anggota tuan rumah.

APEC Economic Leaders Meeting (AELM) adalah forum pertemuan kepala Negara anggota APEC yang diadakan setiap tahunnya dengan tujuan selain sebagai forum dialog ekonomi juga untuk menyusun program dan kebijakan yang akan dijalankan APEC dan mengevaluasi setiap program yang telah dijalankan.

Berikut ini adalah kronologi Rapat Pemimpin Ekonomi APEC dalam beberapa tahun terakhir:

1. Bogor, Indonesia, 1994

Para Pemimpin Ekonomi APEC 'Deklarasi Umum Putuskan (Deklarasi Bogor) diadopsi. Deklarasi itu termasuk tujuan Bogor, yang dijadikan tujuan APEC untuk mencapai perdagangan bebas dan terbuka dan investasi pada 2010 untuk negara industri, dan 2020 untuk negara berkembang. Dalam deklarasi ini, lahir 3 pilar APEC yang menjadi dasar pengembangan skema KPP APEC yang mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tahun 2003 tentang pemberlakuan ABTC sejak 1 Mei 2004.

2. Vancouver, Kanada, 1997

Para pemimpin APEC menyetujui perjanjian menteri ekonomi mereka bahwa tindakan harus diambil untuk liberalisasi sektoral sukarela awal di 15 sektor, dengan sembilan yang akan maju melalui tahun 1998 dan implementasi untuk mulai tahun 1999. Mereka juga mendukung Kerangka Vancouver untuk *Enhanced Public-Private Partnership* untuk Pembangunan Infrastruktur Perekonomian Negara. Pertemuan Vancouver memberikan banyak perhatian pada krisis keuangan yang melanda Asia

Tenggara, sehingga membantu negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk meningkatkan perekonomiannya agar dapat disesuaikan dengan negara-negara APEC lainnya.

3. Auckland, Selandia Baru, 1999

Para pemimpin berjanji untuk memperkuat pasar dan meningkatkan kerangka kerja internasional yang mengatur perdagangan dan investasi. Mereka juga mengesahkan Deklarasi Pemimpin APEC: Tantangan Auckland, dan Prinsip-prinsip APEC untuk Meningkatkan Kompetisi dan Reformasi Regulasi. Hasil dari pertemuan kepala Negara anggota APEC di Auckland pada tahun 1999, memutuskan pemberlakuan skema KPP APEC bagi Negara-negara anggota APEC.

4. Shanghai, Cina, 2001

Pertemuan itu diadakan di bawah tema "Rapat Tantangan Baru di Abad Baru: Mencapai Kesejahteraan umum melalui Partisipasi dan Kerjasama." Ia memiliki tiga sub-tema atau item agenda: berbagi manfaat dari globalisasi dan ekonomi baru, perdagangan maju dan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Para pemimpin mencapai konsensus mengenai skenario ekonomi dunia dan kawasan Asia-Pasifik, arah perkembangan APEC di gedung, kapasitas masa depan manusia dan isu-isu lainnya. APEC menyetujui *Shanghai Accord* yang difokuskan untuk memperluas Visi APEC, menegaskan kembali langkah-langkah mencapai *Bogor Goals* dan memperkuat mekanisme implementasi hasil-hasil perjanjian APEC, dan menyetujui *e-APEC*

Strategy. Shanghai Accord berjalan cukup efektif karena telah memperkuat struktur pasar dan institusi, memfasilitasi investasi infrastruktur dan teknologi untuk transaksi secara elektronik dan mendorong kewirausahaan dan peningkatan kapasitas manusia dengan semakin terbuka luasnya peluang kerja.

5. Sydney, Australia, 2007

Untuk pertama kalinya, negara anggota APEC mengeluarkan deklarasi mengenai perubahan iklim, keamanan energi dan pembangunan bersih menguraikan tindakan di masa depan dalam mendukung suatu perjanjian perubahan iklim internasional yang baru dan mengumumkan program ke depan yang praktis, tindakan koperasi dan inisiatif. Untuk mengefektifkan program-program dalam deklarasi ini, pada tahap awal para pemimpin juga mengadopsi laporan utama pada integrasi ekonomi yang lebih erat regional, termasuk inisiatif reformasi struktural, dan menyambut APEC dengan program baru Rencana Aksi Fasilitasi Perdagangan yang selanjutnya akan memberlakukan pengurangan biaya transaksi perdagangan disetiap Negara anggota APEC sebesar 5 persen pada Januari tahun 2010.

Rangkaian kegiatan pimpinan negara anggota APEC merupakan cikal bakal bagi APEC dalam memunculkan isu-isu ekonomi dan mengeluarkan kebijakan demi meningkatkan ekonomi dikawasan Asia-Pasifik. Salah satu hasil rapat pimpinan negara anggota APEC di Bogor tahun 1994 dikenal dengan *Bogor Goals* disebut sebagai awal kebangkitan organisasi APEC dimana didalamnya

dijelaskan poin-poin penting yang menjadi arah bagi APEC dalam menentukan kebijakan kedepannya.

Deklarasi Bogor (*Bogor Goals*) menghasilkan tiga pilar kerjasama APEC yaitu pilar liberalisasi perdagangan dan investasi, pilar fasilitas bisnis (lebih dikenal sebagai pilar TILF/*Trade and Investment Liberalization and Facilitation*), serta pilar *Economic and Technical Cooperation (ECOTECH)* yang menjadi dasar dan ruang lingkup dalam penyusunan setiap program dan arah kebijakan yang akan dijalankan APEC kedepannya.

Salah satu kemajuan yang telah dicapai APEC dalam bidang fasilitasi perdagangan adalah dengan mengeluarkan keputusan tentang pemberlakuan KPP APEC bagi Negara anggota APEC. Skema KPP APEC yaitu kartu perjalanan bagi pebisnis yang memudahkan para pengusaha untuk bebas keluar masuk ke Negara anggota APEC lainnya.

Skema KPP APEC dibuat berdasarkan respons terhadap kebutuhan para pebisnis dengan mobilitas tinggi di kawasan Asia Pasifik akan kemudahan dalam proses keimigrasian. Skema ini menjadi jawaban yang sangat diperlukan dalam bidang perdagangan dan investasi. KPP APEC memberikan kemudahan keimigrasian bagi para pebisnis untuk keluar dan masuk ke negara-negara partisipan KPP APEC. Para pebisnis memohon KPP APEC di negaranya dan otoritas pemerintah tersebut mengajukan permohonan ke semua negara-negara partisipan KPP APEC. Dengan persetujuan tersebut berarti pebisnis bersangkutan dapat menikmati kemudahan untuk keluar masuk (*multiple short term entry*) selama tiga tahun atau sepanjang masa berlaku paspor ke semua negara-negara peserta KPP APEC yang memberikan persetujuan *pre-clearance*.

Pada tahap ini para pebisnis dapat menghemat waktu karena tidak perlu memohon visa dan izin masuk lagi di kedutaan besar atau perwakilan, karena KPP APEC sudah berfungsi sebagai visa elektronik. Para pebisnis cukup hanya menunjukkan kartu dengan paspor dalam proses keimigrasian di bandara.

Kemudahan lain yang akan didapat adalah proses keimigrasian yang cepat cukup menunjukkan Kartu KPP APEC beserta paspor pada jalur khusus/counter imigrasi yang bertuliskan Pemegang KPP APEC. Sebagai pengaman KPP APEC mempunyai *mechine readable zone* yang memuat data pemegangnya dan masa berlaku kartu selama 3 tahun atau sepanjang masa berlaku paspor kurang dari 3 tahun.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerjasama APEC

a. Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama APEC⁴⁴

Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) menggunakan tiga pilar utama sebagai kunci pencapaian tujuannya berdasarkan hasil dari *Bogor Goals* yaitu;

1. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Liberalisasi Perdagangan dan Investasi dimaksudkan untuk mengurangi dan apabila memungkinkan menghapuskan hambatan tarif dan non tarif. Upaya tersebut difokuskan pada pembukaan pasar untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

⁴⁴ Ruang Lingkup Perjanjian APEC, diupdate dari <http://www.apec.org> dan sekretariat APEC <http://www.apecsec.org.sg> diakses tanggal 17 November 2009

2. Fasilitas bisnis

Fasilitas bisnis memfokuskan kegiatan pada upaya untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan akses pada informasi perdagangan, memaksimalkan manfaat dari teknologi informasi dan menyesuaikan kebijakan dan strategi bisnis untuk mendorong pertumbuhan dan mencapai keterbukaan perdagangan dan investasi.

3. Kerjasama Ekonomi dan Teknik

Economic Technical Cooperation (ECOTECH) memberikan kesempatan pada anggota ekonomi APEC untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan kerjasama sehingga mampu menarik manfaat dari perdagangan dunia dan ekonomi baru (*new economy*). Hasil dari ketiga pilar tersebut akan memperkuat ekonomi anggota APEC melalui pemanfaatan maksimal sumber daya dan meningkatkan efisiensi.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut diatas, APEC telah menghasilkan perjanjian kerjasama yang bertujuan untuk mewujudkan program kerjasamanya dalam kebijakan Rapat Pimpinan APEC (AELM). Adapun perjanjian kerjasama yang telah dihasilkan oleh APEC antara lain:

1. *The Manila Action Plan for APEC (MAPA)*, Manila 1996

Menekankan langkah-langkah liberalisasi dan fasilitas perdagangan dan investasi dalam mencapai *Bogor Goals*.

2. *Osaka Action Agenda (OAA)*, Osaka 1995

Memuat kerangka kerja untuk mencapai *Bogor Goals* melalui liberalisasi perdagangan dan investasi, fasilitas bisnis dan kegiatan sektoral.

3. *Shanghai Accord, Sanghai, 2001*

Difokuskan untuk memperluas Visi APEC, menegaskan kembali langkah-langkah mencapai *Bogor Goals* dan memperkuat mekanisme implementasi. Menyetujui *e-APEC Strategy* guna memperkuat struktur pasar dan institusi, memfasilitasi investasi infrastruktur dan teknologi untuk transaksi secara elektronik dan mendorong kewirausahaan dan peningkatan kapasitas manusia. Ditetapkan di Shanghai tahun 2001.

Untuk mewujudkan perjanjian kerjasama dalam ruang lingkup APEC maka dilakukan beberapa langkah liberalisasi, yakni:

1. Tarif : yaitu melakukan penurunan tarif secara progresif dan menjaga transparansi sistem tarif ekonomi APEC.
2. Kebijakan non-tarif : yaitu mengurangi hambatan kebijakan non-tarif secara progresif dengan menjaga transparansi sistem non-tarif.
3. Perdagangan jasa : yaitu melakukan pengurangan atas pembatasan akses pasar bagi perdagangan jasa secara progresif.
4. Investasi : yaitu mencapai penanaman modal bebas dan terbuka dengan cara liberalisasi regim penanaman modal dan kemudahan berinvestasi dengan bantuan dan kerjasama teknik.

5. Standard dan kesesuaian:

- (1) Menetapkan transparansi penilaian standard dan kesesuaian APEC, menyesuaikan standard secara *voluntary* dan pemberlakuan terhadap standar internasional;

(2) Menuju saling pengakuan standard dan kesesuaian ekonomi APEC, peningkatan kerjasama dan pengembangan infrastruktur melalui kerjasama teknik.

6. Prosedur Kepabeanan : yaitu melakukan penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanan.
7. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) : Melindungi secara efektif HKI melalui perundang-undangan, pengadministrasian dan pelaksanaan.
8. Kebijakan Persaingan : yaitu menghilangkan distorsi perdagangan dan penanaman modal yang ditimbulkan oleh pengaturan atau regulasi, mencapai transparansi dalam sistem pengaturan dan investasi.
9. Deregulasi : menghilangkan hambatan perdagangan dan investasi yang diakibatkan dari peraturan dan perundang-undangan domestik yang tidak hanya menghambat perdagangan dan investasi yang bebas serta terbuka tetapi juga menimbulkan hambatan-hambatan dalam perdagangan dan investasi lebih banyak dari biasanya untuk memenuhi sasaran yang dikehendaki.
10. Ketentuan Asal Barang : menyesuaikan dengan aturan internasional, melaksanakan ketentuan asal barang secara impartial dan transparan.
11. Mediasi Perselisihan
 - a. Mendorong para anggota menyelesaikan persengketaan berdasarkan kerjasama sesegera mungkin, menghindari konfrontasi berdasarkan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian WTO dan perjanjian internasional lainnya.

- b. Memfasilitasi dan mendorong penggunaan prosedur resolusi secara efektif untuk menghindari peselisihan baik antara swasta maupun antara pemerintah dengan swasta.
 - c. Meningkatkan transparansi peraturan dan perundangan-undangan diantara anggota.
12. Pengumpulan dan Analisis Informasi : yaitu akan diciptakan suatu bentuk kerjasama dalam pengumpulan dan analisis informasi.
13. Pelaksanaan Putaran Uruguay : yaitu melaksanakan secara penuh hasil Uruguay Round dalam waktu yang telah disepakati.
14. Mobilitas Pelaku Bisnis : meningkatkan mobilitas para pengusaha dalam menjalankan bisnis dikawasan Asia Pasifik yakni dengan mengacu pada hasil deklarasi bogor (*Bogor Goals*) yaitu memfasilitasi pengusaha dengan mengeluarkan ABTC.

b. Deklarasi Bogor (*Bogor Goals*) Sebagai Pilar Utama Perjanjian Kerjasama APEC

APEC yang berdiri pada tahun 1989 dimaksudkan untuk lebih jauh mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran serta memperkuat komunitas Asia Pasifik. Sejak terbentuk, APEC telah berupaya untuk menurunkan hambatan tarif dan non tarif dengan maksud untuk menciptakan ekonomi domestik yang efisien, meningkatkan ekspor dan perdagangan yang bebas dan terbuka.

Perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja dan memberikan peluang yang lebih luas bagi perdagangan internasional dan investasi. Selain itu, biaya produksi yang lebih rendah akan mendorong terciptanya harga barang dan jasa

yang lebih murah. Untuk itu APEC berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan efisien bagi pergerakan barang, jasa dan manusia melintasi batas negara dikawasan Asia Pasifik melalui pengaturan kebijakan dan kerjasama ekonomi dan teknik.

Setiap kebijakan dan program yang diambil oleh APEC didasarkan pada hasil pertemuan kepala Negara anggota APEC yang diadakan setiap tahunnya. Pada pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC yang pertama pada tahun 1993 di Seattle-Blake Island, Amerika Serikat disepakati sebuah Visi bagi APEC, yaitu: "Terciptanya suatu komunitas yang dilandasi semangat keterbukaan dan upaya kerjasama untuk menghadapi perubahan, memperlancar arus barang, jasa dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mencapai standar hidup dan pendidikan yang lebih tinggi, dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan."

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka APEC telah menghasilkan Deklarasi Bogor (*Bogor Goals*) pada KTT 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cukai hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.

Pada tahun 1994, pemimpin APEC berkumpul di Bogor, Indonesia, untuk mengumumkan komitmen mereka bersama untuk mencapai perdagangan bebas dan terbuka dan investasi pada 2010 untuk negara industri dan pada tahun 2020 untuk negara berkembang. Sasaran ini dikenal sebagai "Sasaran Bogor", sebuah manifestasi ambisius kepercayaan umum bahwa perdagangan bebas dan terbuka

dan investasi sangat penting untuk mewujudkan potensi pertumbuhan daerah dan meningkatkan hasil-hasil ekonomi dan sosial bagi semua negara anggota APEC.

Bogor Goals merupakan deklarasi APEC yang ditetapkan pada tahun 1994 untuk mewujudkan Visi kerjasama ekonomi. Adapun tujuan APEC yang dicantumkan dalam *Bogor Goals* adalah:

1. Menciptakan sistem perdagangan dan investasi yang bebas, terbuka dan adil dikawasan tahun 2010/2020 untuk ekonomi maju dan ekonomi berkembang.
2. Memimpin dalam memperkuat sistem perdagangan multilateral yang terbuka, meningkatkan liberalisasi perdagangan dan jasa, mengintensifkan kerjasama ekonomi di Asia-Pasifik.
3. Mempercepat proses liberalisasi melalui penurunan hambatan perdagangan dan investasi yang lebih jauh, meningkatkan arus barang, jasa, modal secara bebas dan konsisten dengan GATT.

Sejak Deklarasi Bogor pada tahun 1994, *Bogor Goals* telah menyerahkan manfaat besar bagi pertumbuhan daerah secara keseluruhan dalam perdagangan untuk semua negara APEC dan telah melampaui seluruh dunia. Dari tahun 1994 hingga 2009, arus perdagangan barang dunia meningkat pada tingkat tahunan sebesar 7,1%, mencapai AS \$ 11,4 triliun. Nilai nominal perdagangan jasa komersial di wilayah APEC juga meningkat pada tingkat tahunan sekitar 7% mencapai jumlah US \$ 2,4 triliun. Di tahun 2009 arus masuk investasi langsung asing (FDI) di wilayah APEC memiliki meningkat sebesar 13,0% per tahun sejak tahun 1994 dan keluar telah tumbuh sebesar 12,7% per tahun. Ekonomi APEC juga telah mengambil langkah-langkah yang signifikan pada fasilitasi

perdagangan untuk merampingkan prosedur kepabeanan dan menyelaraskan standar dan prosedur penyesuaian.⁴⁵

Penilaian apakah APEC telah sepenuhnya berkembang kearah pencapaian *Bogor Goals* tentunya tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh pemerintah. Kredibilitas APEC ditentukan terutama oleh manfaat yang dirasakan dunia usaha pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya di semua negara anggota APEC.

Pendekatan Bogor Goals dilakukan dengan menyepakati arahan/pedoman (*roadmap*) kerjasama APEC yang dikenal dengan “Agenda Aksi Osaka (OAA)” yang memuat: tiga pilar kerjasama ekonomi APEC, prinsip umum kerjasama, instrumen pokok kerjasama dan bidang-bidang kerjasama APEC.

Salah satu dari 3 pilar kerjasama APEC adalah memberikan fasilitas dalam perdagangan agar meningkatkan mobilitas pengusaha-pengusaha dari Negara anggota APEC ke Negara anggota lain, seperti dengan melakukan pengembangan skema KPP APEC yaitu dengan menerbitkan kartu perjalanan pebisnis yang memudahkan para pengusaha untuk bebas keluar masuk ke Negara anggota APEC lainnya.

⁴⁵ *Manfaat Perdagangan APEC*, didistribusikan oleh Biro Program Informasi Internasional, Departemen Luar Negeri AS, diupdate dari: [Http://www.america.gov](http://www.america.gov), diakses tanggal 15 januari 2010

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan *APEC Bussiness Travel Card (ABTC)* dalam Perjanjian Kerjasama APEC

Pada pertemuan para Pemimpin Ekonomi APEC yang pertama pada tahun 1993 di Seattle-Blake Island, Amerika Serikat telah disepakati sebuah Visi bagi APEC, yaitu: “terciptanya suatu komunitas yang dilandasi semangat keterbukaan dan upaya kerjasama untuk menghadapi perubahan, memperlancar arus barang, jasa dan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mencapai standar hidup dan pendidikan yang lebih tinggi, dan mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka APEC menghasilkan Deklarasi Bogor (*Bogor Goals*) pada KTT APEC tahun 1994 di Bogor yang bertujuan untuk menurunkan bea cukai hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020.

Berdasarkan Deklarasi Bogor (*Bogor Goals*), maka lahirlah 3 pilar utama dalam pencapaian tujuan APEC yaitu:

1. Liberalisasi Perdagangan dan Investasi

Liberalisasi Perdagangan dan Investasi dimaksudkan untuk mengurangi dan apabila memungkinkan menghapuskan hambatan tarif dan non tarif. Upaya tersebut difokuskan pada pembukaan pasar untuk meningkatkan perdagangan dan investasi.

2. Fasilitas Bisnis

Fasilitas bisnis memfokuskan kegiatan pada upaya untuk mengurangi biaya transaksi, meningkatkan akses pada informasi perdagangan, memaksimalkan manfaat dari teknologi informasi dan menyesuaikan kebijakan dan strategi bisnis untuk mendorong pertumbuhan dan mencapai keterbukaan perdagangan dan investasi.

3. Kerjasama Ekonomi dan Teknik

Economic Technical Cooperation (ECOTECH) memberikan kesempatan pada anggota ekonomi APEC untuk meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan kerjasama sehingga mampu menarik manfaat dari perdagangan dunia dan ekonomi baru (*new economy*). Hasil dari ketiga pilar tersebut akan memperkuat ekonomi anggota APEC melalui pemanfaatan maksimal sumber daya dan meningkatkan efisiensi.

Untuk mewujudkan program-program kerjasama APEC berdasarkan 3 pilar utama seperti yang dicantumkan dalam *Bogor Goals*, maka dikeluarkan sebuah kebijakan untuk memfasilitasi pebisnis-pebisnis bagi negara anggota APEC yang bertujuan untuk meningkatkan aliran barang, jasa, dan modal di antara negara APEC dengan menghilangkan administrasi dan hambatan-hambatan perdagangan dan investasi. Memberikan fasilitas bisnis demi meningkatkan mobilitas perdagangan sesama Negara anggota APEC dicantumkan dalam hasil pertemuan pimpinan negara anggota APEC di Bogor yang dikenal dengan Deklarasi Bogor (*Bogor Goals*) pada poin ketujuh (7) yaitu:

“(7) To complement and support this substantial process of liberalization, we decide to expand and accelerate APEC'S trade and investment facilitation programs. This will promote further the flow of

goods, services, and capital among APEC economies by eliminating administrative and other impediments to trade and investment. We emphasize the importance of trade facilitation because trade liberalization efforts alone are insufficient to generate trade expansion. Efforts at facilitating trade are important if the benefits of trade are to be truly enjoyed by both business and consumers. Trade facilitation has also a pertinent role in furthering our goal of achieving the fullest liberalization within the global context. In particular we ask our ministers and officials to submit proposals on APEC arrangements on customs, standards, investment principles and administrative barriers to market access. To facilitate regional investment flows and to strengthen APEC's dialogue on economic policy issues, we agree to continue the valuable consultations on economic growth strategies, regional capital flows and other macro-economic issues". (“(7) Untuk melengkapi dan mendukung proses liberalisasi, kami memutuskan untuk memperluas dan mempercepat perdagangan APEC dan program investasi fasilitasi. Hal ini akan lebih meningkatkan aliran barang, jasa, dan modal di antara negara APEC dengan menghilangkan proses administrasi dan hambatan lain dalam perdagangan dan investasi. Kami menekankan pentingnya fasilitasi perdagangan karena upaya liberalisasi perdagangan cukup untuk menghasilkan ekspansi perdagangan. Upaya memfasilitasi perdagangan penting jika manfaat perdagangan benar-benar dinikmati oleh keperluan bisnis dan konsumen. Fasilitasi Perdagangan juga memiliki peran dalam memajukan tujuan kita mencapai liberalisasi penuh dalam konteks global. Secara khusus kami meminta menteri dan pejabat untuk mengajukan proposal pada pengaturan APEC di kebiasaan, standar, prinsip-prinsip investasi dan hambatan administratif untuk akses pasar. Untuk memfasilitasi arus investasi dikawasan dan untuk memperkuat dialog APEC pada isu-isu kebijakan ekonomi, kami setuju untuk melanjutkan konsultasi berharga tentang strategi pertumbuhan ekonomi, arus modal regional dan isu-isu ekonomi makro”).

Sesuai dengan point ketujuh *Bogor Goals* tersebut, dapat dianalisa bahwa untuk memenuhi kebutuhan perdagangan dan investasi sebagai upaya dalam rangka liberalisasi perdagangan di kawasan Asia-Pasifik, maka APEC memberikan fasilitas perdagangan bagi pengusaha/pebisnis Negara anggota APEC dengan mengeluarkan ketentuan tentang pengembangan KPP APEC.

KPP APEC adalah dokumen perjalanan yang dikeluarkan untuk pelancong bisnis bagi warga Negara anggota APEC yang berpartisipasi ekonomi. Berlaku

selama tiga tahun, kartu menghilangkan kebutuhan pemegangnya untuk memiliki visa ketika mengunjungi negara anggota APEC lainnya yang berpartisipasi ekonomi selama *pra-clearance*⁴⁶ telah diperoleh selama proses aplikasi.

Untuk memperoleh KPP APEC, warga negara tersebut dapat mengajukan permohonan Kartu di pemerintah nasional mereka, atas nama mereka yang saat ini beredar di antara negara peserta lainnya yang memberikan *pra-entry clearance* (izin sebelum melewati perbatasan) apabila seluruh persyaratan tersebut dipenuhi.

KPP APEC ini diterbitkan dalam bentuk kredit, yang akan dapat dibaca oleh mesin-mesin yang telah tersedia di setiap bandara yang menyediakan jalur khusus ABTC. Pada KPP APEC terdapat kelengkapan sebagai berikut:⁴⁷

- *Name* (Nama)
- *Sex* (Jenis Kelamin)
- *Economy [name of the member economy]* (Ekonomi [nama ekonomi anggota])
- *Date of Birth* (Tanggal lahir)
- *Expiry Date* (Tanggal Kadaluwarsa)
- *Signature* (Tanda tangan)
- *Passport Number* (Nomor Paspor)

⁴⁶ Merupakan pemeriksaan awal terhadap permohonan KPP APEC bagi pebisnis Indonesia sebelum diteruskan guna mendapatkan persetujuan untuk masuk dan tinggal dari negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC, serta pemeriksaan terhadap permintaan persetujuan masuk dan tinggal di Indonesia bagi pemegang KPP APEC dari negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC dengan menggunakan perangkat lunak KPP APEC.

⁴⁷ *Kartu Perjalanan Pebisnis APEC*, diupdate dari www.wikipedia.org/APEC-Bussiness Travel Card, diakses tanggal 17 Januari 2011

Selain dari nama ekonomi anggota, tidak ada tanda-tanda nasional yang hadir pada kartu KPP APEC ini. Pada bagian belakang kartu, negara anggota yang telah disetujui *clearance* ditampilkan. Strip Mesin dibaca dimulai dengan "CP", diikuti oleh singkatan dari ekonomi penerbitan. Singkatan dalam konformasi dengan huruf 3 ISO 3166-1 alpha-3 kode Negara.

Kartu ini harus secara umum digunakan dalam hubungannya dengan paspor dan memiliki keuntungan sebagai berikut:⁴⁸

- Visa *Pra-Clearance*: tidak ada persyaratan visa untuk kunjungan singkat (sampai 60-90 hari)
- Dipercepat melewati jalur perbatasan di negara anggota, dan Amerika Serikat dan Kanada
- Dipercepat penjadwalan wawancara visa

Dengan kata lain, KPP APEC memotong melalui birokrasi perjalanan bisnis karena dengan formulir aplikasi KPP APEC, kartu sudah terakreditasi memungkinkan para pelaku bisnis untuk mendapatkan *multiple-entry* bisnis jangka pendek pengunjung untuk berpartisipasi ekonomi. Pemegang kartu ini juga menghemat waktu dan usaha yang terlibat dalam mengajukan permohonan visa atau izin masuk individu.

Jangka waktu bagi Pemegang Kartu dapat tinggal setidaknya dua (2) bulan pada setiap kunjungan, dengan beberapa negara yang berpartisipasi menyediakan tiga (3) bulan tinggal pada setiap kunjungan. adapun masa berlaku kartu *multiple-*

⁴⁸ *Ibid.*

entry untuk berpartisipasi ekonomi selama tiga (3) tahun. Namun sebagai catatan: Jika mendapatkan paspor baru, harus mendapatkan APEC Perjalanan Bisnis Kartu yang baru sebagai dua dokumen terkait.

B. Implementasi Ketentuan Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pasific Economic Cooperation* (KPP APEC) di Indonesia

Tujuan forum APEC ini selain untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan juga mengembangkan dan memproyeksikan kepentingan-kepentingan kawasan dalam konteks multilateral. Mengingat APEC lebih dititikberatkan pada hubungan ekonomi, maka setiap anggota, termasuk negara, disebut sebagai entitas ekonomi.

Sebagai salah satu negara yang berperan aktif dalam pembentukan APEC maupun pengembangan kerjasamanya, keikutsertaan Indonesia dalam APEC sangat didorong oleh kepentingan Indonesia untuk mengantisipasi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi perdagangan dunia yang bebas sekaligus mengamankan kepentingan nasional RI. Kontribusi Indonesia terbesar bagi APEC adalah selain mampu dengan sukses menyelenggarakan Pertemuan Pimpinan Negara anggota APEC tahun 1994, juga disepakatinya komitmen bersama yang dikenal juga sebagai 'Tujuan Bogor' (*Bogor Goals*) yaitu liberalisasi perdagangan dan investasi secara penuh pada tahun 2010 untuk ekonomi yang sudah maju, dan tahun 2020 untuk ekonomi berkembang. Komitmen ini menjadi dasar dalam berbagai inisiatif untuk mendorong percepatan penghapusan tarif perdagangan maupun investasi antar anggota APEC.

APEC tidak bisa dipisahkan dari peranan Indonesia. Indonesia memainkan peran yang sangat menentukan untuk merumuskan visi APEC. Indonesia juga

berperan aktif dalam mencetuskan *Bogor Goals*, yaitu mewujudkan kawasan perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka tahun 2010 untuk negara maju serta 2020 untuk negara berkembang. Anggota APEC saat ini merepresentasikan sepertiga populasi dunia dan hampir 50% kekuatan perekonomian global. Dengan kata lain, potensi pasar global dan gravitasi aktivitas ekonomi dunia berada di kawasan ini. Masalahnya kini, seberapa jauh manfaat dan efektivitas forum kerjasama APEC bagi perkembangan perdagangan dan investasi, serta mobilitas bisnis di Indonesia kedepannya.⁴⁹

Dalam pengimplementasiannya, Indonesia telah melakukan berbagai kerjasama yang memfasilitasi laju perdagangan seperti harmonisasi dan standarisasi, simplifikasi dan proses kepabeanan, pengembangan *e-commerce*, dan kemudahan proses keimigrasian. Sebagai contoh dengan menerapkan skema KPP APEC di Indonesia setelah pemerintah Indonesia menandatangani skema KPP APEC pada tanggal 15 Agustus 2002 di Acapulco Meksiko.

Berdasarkan penandatanganan skema KPP APEC tersebut, maka di Indonesia mulai memberlakukan KPP APEC sejak 1 Mei 2004 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Nomor : M. 03. IZ. 03. 10 tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*. Pada pasal 1 dijelaskan:

“KPP APEC adalah kartu elektronik yang memuat jati diri pemegangnya, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari negara anggota yang menerapkan skema KPP APEC, untuk melakukan perjalanan dan tinggal di negara yang telah memberikan persetujuan”.

⁴⁹ Kuncoro, Mudrajat, *Analisis, APEC dan Kepentingan Indonesia*. 2007. Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta.

Pada bulan Agustus 2005, Departemen Luar Negeri (Deplu) bekerja sama dengan CSIS mengadakan workshop dengan tema “APEC dan Indonesia di Persimpangan Jalan”. Workshop ini, yang dihadiri kalangan swasta, akademisi, LSM, dan pemerintah, dibagi menjadi dua sesi. Sesi Pertama membahas tema “*Mid-Term Stocktake: Kemajuan dan Tantangan dalam Bidang Liberalisasi dan Fasilitasi Menuju Bogor Goals*”. Fokus sesi ini adalah mengidentifikasi sejauh mana liberalisasi perdagangan dan investasi dalam forum APEC telah dicapai. Berbagai hambatan pada bidang-bidang yang belum mencapai kemajuan juga dibahas dalam sesi ini.⁵⁰

Hal diatas semakin mempertegas bahwa diperlukan sebuah pengaturan nasional untuk menciptakan kemajuan yang dapat meningkatkan mobilitas bisnis bagi pengusaha-pengusaha diseluruh Negara anggota APEC agar dapat disesuaikan dengan perkembangan perdagangan yang semakin pesat diseluruh kawasan dunia. Maka melihat peluang itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengaturan tentang ABTC/Kartu Perjalanan Bisnis APEC melalui Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan KPP APEC untuk warga negara Indonesia adalah Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2005 yang diterbitkan pada Desember 2005 yang disebutkan pada pasal 1 ayat (1) bahwa Kartu Perjalanan Bisnis APEC sebagai salah satu jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM.

KPP APEC adalah salah satu upaya forum APEC di bidang Fasilitasi Perdagangan untuk memberikan kemudahan mobilitas bisnis bagi para pengusaha

⁵⁰ Ridiani Kurnia, *Workshop: “APEC Dipersimpangan Jalan”*, 2005, Departemen Luar Negeri, Jakarta

di negara/ekonomi anggota forum APEC. Dengan memiliki kartu KPP APEC, para pengusaha tidak perlu lagi mengajukan visa ke perwakilan negara/ekonomi anggota APEC mengingat kartu KPP APEC tersebut berfungsi sebagai visa elektronik dan menikmati fasilitas *multiple short-entry* ke 17 negara/ekonomi anggota APEC selama 3 tahun.

Untuk memperkenalkan KPP APEC yang berfungsi sebagai Fasilitas Perdagangan dalam kerangka APEC di Indonesia, maka Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika serta Departemen Luar Negeri RI menyelenggarakan acara "*Dialog Pemerintah-Swasta untuk mendorong Fasilitas Perdagangan dalam kerangka APEC*" di Hotel Borobudur, Jakarta, pada tanggal 12 Maret 2007. Acara dialog ini yang ditujukan terutama bagi kalangan pengusaha yang diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengusaha nasional mengenai upaya-upaya yang dilakukan negara/ekonomi anggota APEC dalam mendorong fasilitas perdagangan, serta guna mendapatkan input bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan fasilitas perdagangan di Indonesia maupun di kawasan melalui forum APEC.

Acara dialog tersebut menghadirkan Duta Besar Australia, Duta Besar China dan perwakilan dari Kedubes Jepang yang akan menyampaikan upaya-upaya yang dilakukan oleh negara/ekonomi masing-masing di bidang fasilitas perdagangan termasuk pemanfaatan KPP APEC, baik dalam kerangka APEC maupun bersifat nasional. Selain itu akan hadir pula para pejabat dari Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea dan Cukai, Badan Standarisasi Nasional dan Depkominfo

yang masing-masing akan menyampaikan presentasi mengenai mobilitas bisnis, penyederhanaan prosedur kepabeanan dan modernisasi sistem bea dan cukai.

Menurut Hasan Wirayudha dalam pidatonya tentang perkembangan APEC menekankan bahwa, KPP APEC merupakan salah satu kemajuan yang signifikan dalam APEC. Para pengusaha Indonesia disarankan segera memanfaatkan KPP APEC untuk kelancaran bisnisnya dan pihak Ditjen Imigrasi dapat segera memberikan fasilitas yang diperlukan untuk hal ini. Fasilitasi Perdagangan tidak hanya sekedar merupakan penyederhanaan dan harmonisasi, namun merupakan suatu upaya menuju manajemen perdagangan yang lebih baik atau *better management of trade*. Manajemen perdagangan yang baik tentu akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi kalangan usaha khususnya dalam memberikan kepastian dan kemudahan bertransaksi.⁵¹

Direktur Dokumen Perjalanan, Visa, dan Fasilitas Keimigrasian (Doklanvisfaskim) Ditjen Imigrasi Djoni Muhammad menjelaskan bahwa, "KPP APEC adalah sejenis kartu untuk para pebisnis dan PNS eselon I. Dengan KPP APEC, mereka mendapatkan kemudahan keluar-masuk negara-negara APEC tanpa harus mengurus visa berkali-kali. Masa berlaku kartu tersebut tiga tahun. Seperti visa, pemegang KPP APEC akan bisa berada di sebuah negara APEC selama 60 hari. Pebisnis akan menghemat waktu. Mereka tidak perlu memohon visa atau izin masuk lagi ke kedubes atau perwakilan negara. Pebisnis cukup menunjukkan KPP APEC dan paspor dalam proses keimigrasian di bandara. Ketika sampai ke negara tujuan, para pebisnis juga tidak perlu antre panjang.

⁵¹ Hasan Wirayudha, "Dialog Pemerintah-Swasta untuk Mendorong Fasilitasi Perdagangan dalam Kerangka APEC", 2007, Hotel Borobudur, Jakarta, atas inisiatif Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Departemen Luar Negeri

Sebab, sudah ada *counter* khusus yang melayani. Saat ini ada 1.138 orang Indonesia yang menggunakan kartu tersebut. Tahun depan kami menargetkan peningkatannya sampai 50 persen".⁵²

Pada pasal 2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Republik Indonesia Nomor : M. 03. IZ. 03. 10 tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation* dijelaskan Kartu Perjalanan Pebisnis APEC dapat diberikan kepada:

- a. Pebisnis warga Indonesia yang bonafid dan sering melakukan perjalanan bisnis ke negara-negara yang menerapkan skema APEC;
- b. Pejabat Pemerintah RI setingkat Menteri dan Pejabat eselon I yang akan melakukan tugas kedinasan ke negara-negara anggota APEC yang menerapkan skema KPP APEC.
- c. Pegawai Negri Sipil yang ditugaskan menangani skema KPP APEC.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 tahun 2004 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*, Pelaksanaan dan Pembatalan *Pre Clearance*, serta Pelayanan Keimigrasian di tempat Pemeriksaan Imigrasi, untuk memperoleh KPP APEC, pemohon wajib mengisi formulir permohonan dengan melampirkan sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari perusahaan/ instansi

⁵² Djoni Muhammad, "Imigrasi Sosialisasikan ABTC", Jawa Pos, 18 Desember 2009

2. Surat keterangan dari bank yang menyatakan pemohon memiliki rekening Koran
3. Dokumen perjalanan yang berlaku sekurang-kurangnya 2 tahun
4. Tidak terlibat kriminal, dibuktikan dengan catatan kepolisian
5. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar

Berdasarkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon tersebut, terungkap bahwa banyak pengusaha Indonesia menyampaikan keberatannya atas salah satu syarat yang dikenakan untuk memperoleh kartu KPP APEC. Di antaranya surat bank yang menunjukkan bahwa pemohon memiliki rekening koran atau tabungan pribadi senilai minimal Rp 500 juta. Ika Yarmanti, seorang pengusaha kerajinan kerang yang sering mengekspor produksinya ke Inggris dan Prancis menyatakan, “banyak yang tertarik menggunakan KPP APEC disebabkan biaya imigrasinya tidak memberatkan, namun persyaratan rekening korannya sangat memberatkan terutama bagi pengusaha kecil dan menengah”. Sementara itu, menurut Pandu Nusawan, Direktur Lintas Batas dan Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM, “syarat rekening koran tersebut dimaksudkan untuk membuktikan bonafiditas pengusaha yang memohon kartu APEC. Sesuai dengan keputusan Dirjen Imigrasi tahun 2004, bahwa pengusaha yang dapat mengajukan KPP APEC adalah pengusaha yang bonafide”.⁵³

⁵³ Natalia Santi, *Indonesia Belum Mampu Memanfaatkan Fasilitas Bisnis APEC*, Harian Umum Sore, Rabu 14 maret 2007

Pebisnis yang dikategorikan bonafid disini didefenisikan sebagai seseorang yang melakukan perniagaan bentuk barang dan atau jasa atau melakukan investasi. Kriteria pebisnis bonafid tidak termasuk, antara lain:⁵⁴

- a. Keluarga pebisnis yang bersangkutan
- b. Orang yang bermaksud untuk bekerja atau orang yang bekerja sambil berlibur.
- c. Atlet profesional, koresponden berita, pekerja hiburan, pemusik, artis, atau pekerja dalam bidang yang sejenis.

Dalam surat referensi yang dikeluarkan oleh KADIN Provinsi DKI Jakarta untuk KPP APEC, adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan KPP APEC melalui KADIN Provinsi DKI Jakarta adalah:⁵⁵

- foto kopi paspor (yang masih berlaku minimal 2 tahun)
- surat referensi dari Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
- surat keterangan catatan kepolisian (Surat Keterangan Kelakuan Baik)
- foto kopi rekening koran atau rekening tabungan pribadi
- pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 (empat) lembar

Untuk tahun 2007, Indonesia merencanakan 3 pelabuhan masuk yang baru untuk pemegang kartu KPP APEC yaitu melalui :⁵⁶

1. Batam Terminal Ferry Centre,
2. Juanda International Airport di Surabaya, dan

⁵⁴ *Analisis Implementasi KPP APEC pada Ekonomi Indonesia sebagai sebuah Kebijakan*, diupdate dari <http://eprints.ui.ac.id>, diakses tanggal 25 Januari 2011

⁵⁵ *Syarat-syarat Permohonan dan Ketentuan ABTC di Indonesia*, diupdate dari <http://www.imigrasi.go.id>, dan kpp.apec@imigrasi.go.id, diakses tanggal 15 November 2009

⁵⁶ *Ibid*

3. Polonia International Airport di Medan sebagai tambahan dari dua pelabuhan yang sudah berlaku yaitu: Ngurah Rai Bali International Airport di Bali dan Soekarno Hatta International airport di Jakarta. Sehingga seluruhnya terdapat lima pelabuhan internasional untuk KPP APEC holders; Indonesia juga melakukan perluasan pada sejumlah pelabuhan masuk untuk pemegang kartu KPP APEC dengan yaitu :

1. Pelabuhan Laut

- Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang;
- Bandar Bintan Telani Lagoi
- Bandar Sri Udana Lobam
- Tanjung Uban;
- Yos Sudarso, Dumai;
- Belawan, Medan;
- Sekupang, Batu Ampar, Nongsa, Marina Teluk Senimba, Batam.

2. Pelabuhan Udara

- Minangkabau International Airport, Padang;
- Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru;
- Adisucipto, Yogyakarta;
- Ahmad Yani, Semarang;
- Adisumarmo, Solo;
- Selaparang, Mataram;
- Sepinggan, Balikpapan;
- Sam Ratulangi, Manado;
- Hang Nadim, Batam;

- Hassanudin, Makasar;
- Eltari, Kupang;
- Halim Pedana Kusuma, Jakarta;
- Husein Sastranegara, Bandung.

Pada pasal 1 Keputusan Direktur Jendral Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation*, Pelaksanaan Dan Pembatalan *Pre Clearance*, Serta Pelayanan Keimigrasian Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi disebutkan Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC/APEC *Bussiness Travel Card* (ABTC) diterbitkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk di Kantor Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan Keputusan Dirjen Imigrasi tentang KPP APEC tersebut, maka secara garis besar implemtasi KPP APEC yang dilakukan ekonomi Indonesia, dilakukan dengan 3 (tiga) pelaksanaan teknis operasional:⁵⁷

- a. Tata cara penerbitan dan pembatalan
- b. Pelaksanaan dan pembatalan *pre clearance*
- c. Tata cara pelayanan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Adanya proses *pre clearance* dalam kebijakan fasilitas KKP APEC, telah menjadi sebuah terobosan baru dalam system pemberian visa di Indonesia yang lebih memberikan pelayanan dengan cepat, efisien, dan merupakan jalur alternatif bagi pebisnis untuk dapat lebih leluasa dan efisien dalam rangka mendapatkan visa untuk dapat melakukan perjalanan bisnis.

⁵⁷ *Ibid.*

Jalur APEC yang terletak di terminal Kedatangan dan Keberangkatan di beberapa tempat yang telah ditetapkan oleh Dirjen Imigrasi Republik Indonesia, yaitu:⁵⁸

1. Bandara Soekarno-Hatta International (Jakarta)
2. Bandar Udara Internasional Ngurah Rai (Bali)
3. Bandar Udara Internasional Polonia (Medan)
4. Bandar Udara Internasional Juanda (Surabaya)
5. Pelabuhan Ferry Internasional Batam

C. Kendala yang Dihadapi oleh Indonesia dalam Mengimplementasikan Ketentuan tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pasific Economic Cooperation (KPP APEC)

Berbagai upaya telah dilakukan oleh semua negara anggota APEC dalam mengimplementasikan program-program yang telah disepakati dalam setiap hasil pertemuan kepala Negara anggota APEC. Namun masih banyak kendala yang dihadapi terutama dalam pencapaian tujuan *Bogor Goals* sebagai acuan program-program APEC, yaitu:⁵⁹

1. Sangat lambat kemajuan yang dicapai dalam liberalisasi isu-isu sensitif di bidang ekonomi sehubungan dengan besarnya kepentingan negara anggota Ekonomi maju;

⁵⁸ *APEC Bussiness Travel Card*, diupdate dari [www.http://itpcsydney.com](http://itpcsydney.com), diakses tanggal 6 Februari 2008

⁵⁹ *Perhatian Utama APEC Harus Dikembalikan Pada Kerjasama Ekonomi*, diupdate dari <http://berita.kapanlagi.com/ekonomi/nasional/APEC>, diakses tanggal 25 januari 2011

2. Dimasukkannya isu-isu non ekonomi seperti *human security*, *health security*, *export control*, dan terakhir terkait isu terorisme. Hal ini seperti menyimpang dari jalur kerjasama APEC yang mengutamakan pembahasan pada pengembangan ekonomi bagi setiap Negara APEC.

Hal tersebut diatas merupakan kendala utama yang dihadapi APEC dalam mewujudkan semua program yang telah dihasilkan. Artinya, semua program yang telah dihasilkan oleh APEC tidak dapat berjalan maksimal dan diimplementasikan oleh semua Negara anggota di negaranya masing-masing. Ini tidak lepas dari kelemahan APEC yang bersifat sebagai organisasi yang terbuka dan tidak mengikat, sehingga setiap program yang telah dihasilkan tidak menjadi kewajiban bagi Negara-negara anggota untuk menerapkannya di negaranya masing-masing.

Banyak program yang dihasilkan APEC dalam tujuannya meningkatkan kerjasama dan perekonomian negara-negara di kawasan Asia-Pasifik, salah satunya program pengembangan skema KPP APEC. Sebagai negara yang selalu ikut aktif dalam perkembangan APEC, Indonesia mengimplementasikan ketentuan ABTC berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM pada tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah tahun 2005.

Pemerintah Indonesia memperkenalkan dan sekaligus mensosialisasikan hasil program APEC di bidang Fasilitasi Perdagangan yaitu KPP APEC, bersama Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika dan Departemen Luar Negeri, telah menyelenggarakan acara Dialog Pemerintah-Swasta untuk mendorong Fasilitasi Perdagangan dalam kerangka APEC di Hotel Borobudur, Jakarta, pada tanggal 12

Maret 2007. Acara dialog ini yang ditujukan terutama bagi kalangan pengusaha dan pebisnis ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para pengusaha nasional mengenai upaya-upaya yang dilakukan negara/ekonomi anggota APEC dalam mendorong fasilitasi perdagangan, serta guna mendapatkan input bagi pemerintah dalam mengembangkan kebijakan fasilitasi perdagangan di Indonesia maupun di kawasan melalui forum APEC.

Namun masih banyak pengusaha Indonesia yang tampaknya belum mengetahui mengenai fasilitas perdagangan yang mempermudah perjalanan bisnis di 17 negara/ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu KPP APEC. Sejak fasilitas KPP APEC pertama kali diperkenalkan tahun 1997, jumlah pengusaha Indonesia yang tercatat telah memohon KPP APEC hanya sekitar 127 pengusaha.⁶⁰⁻

Jumlah tersebut adalah sangat kecil dibandingkan jumlah pemohon dari negara/ ekonomi anggota APEC lainnya seperti Australia yang tercatat sekitar 10.214 pemohon, Korea Selatan 2439 pemohon, Hongkong 4072 pemohon atau bahkan dibandingkan dengan pemohon dari negara/ekonomi di kawasan ASEAN lainnya seperti Malaysia 615 pemohon, Thailand 960 pemohon dan Vietnam 421 pemohon.⁶¹

Dari keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kurangnya permohonan yang mengajukan penerbitan KPP APEC dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

⁶⁰ *Jurnal Deplu: Pengusaha Nasional Kurang Manfaatkan Kartu Perjalanan Bisnis APEC (ABTC)*, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, 2007, Jakarta

⁶¹ *Ibid*

1. Masih kurangnya sosialisasi dari pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Imigrasi Republik Indonesia sebagai pihak yang berwenang dalam memberikan informasi terhadap tata cara permohonan, dan penerbitan ABTC di Indonesia, sehingga masyarakat kurang mengenal ABTC.
2. Beberapa persyaratan dari KPP APEC tidak relevan bagi situasi perekonomian dan memberatkan bagi masyarakat Indonesia terutama bagi pengusaha kalangan menengah kebawah.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil Deklarasi Bogor (Bogor Goals) pada tahun 1994 point ketujuh (7), maka APEC mengeluarkan sebuah kebijakan bersama dengan memberlakukan Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC). Implementasi KPP APEC di Negara-negara anggota APEC yaitu memberikan kemudahan bagi semua Negara anggota APEC yang memberlakukan KPP APEC di negaranya (meratifikasinya) untuk dapat melakukan semua kegiatan ekonomi dari dan ke Negara anggota APEC lainnya dengan bebas tanpa ada hambatan dari Negara yang dilalui.
2. Implementasikan KPP APEC di Indonesia mulai tanggal 1 Mei 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM RI yang menjelaskan bahwa *APEC Bussiness Travel Card* mulai diberlakukan di Indonesia dengan nama KPP APEC dan Ditjen Imigrasi sebagai pihak yang berwenang dalam mengeluarkan setiap peraturan yang berhubungan dengan penerbitan dan tata cara lainnya. Mengenai tata cara penerbitan dan penggunaannya, pemerintah telah mengeluarkan pengaturan tentang KPP APEC melalui Keputusan Dirjen Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 tahun 2004 menjelaskan bahwa Tata Cara Penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation* diatur oleh Ditjen

Imigrasi/pejabat imigrasi sebagai pihak yang berwenang yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

3. Kendala yang dihadapi dalam implementasi KPP APEC adalah terletak pada sifat organisasi APEC yang bersifat sebagai organisasi yang terbuka dan tidak mengikat (*non binding*) mengakibatkan setiap program yang telah dihasilkan tidak menjadi kewajiban bagi Negara-negara anggota untuk menerapkannya di negaranya masing-masing. Sehingga, tidak ada aturan hukum yang mengikat karena APEC hanya mengeluarkan peraturan dalam bentuk Deklarasi (dokumen tidak resmi yang berupa komitmen bersama yang tidak mengikat).

B. SARAN

Saran yang dapat penulis sampaikan berhubungan dalam penulisan hukum ini, antara lain:

1. Setiap program yang dihasilkan dari pertemuan APEC sebaiknya disepakati secara bersama oleh semua Negara anggota APEC serta mempunyai kewajiban hukum (*legal obligation*) apakah itu dalam bentuk perjanjian internasional yang dilengkapi dengan pasal-pasal disertai aturan-aturan didalamnya. Hal ini bertujuan untuk dapat diimplementasikan dan dijalankan secara serentak sehingga semua Negara menyepakati kebijakan tersebut.
2. Pemerintah dalam hal ini hendaklah mempertimbangan dalam setiap mengeluarkan keputusan terkait dengan manfaatnya bagi masyarakat luas, terutama bagi pebisnis dari kalangan menengah kebawah. Sebagai contoh, dalam Pada pasal 2 Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Republik

Indonesia Nomor : M. 03. IZ. 03. 10 tahun 2003 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation* dijelaskan Kartu Perjalanan Pebisnis APEC dapat diberikan kepada pebisnis yang bonafid dengan syarat memiliki tabungan sebesar Rp.500.000.000,-. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi pebisnis yang berada dikalangan menengah kebawah. Maka seharusnya syarat tersebut dihilangkan atau dihapus agar meringankan bagi masyarakat.

3. Kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pengimplementasian ABTC di Indonesia dan Negara anggota APEC lainnya mungkin dapat diminimalisir dengan cara APEC hendaklah dalam mengeluarkan suatu kebijakan atau program memberikan kekuatan hukum yang mampu mengikat semua Negara anggota APEC sehingga dapat berjalan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Lerroy Bennet, *International Organization*, Prentice Hall. Inc, 1979
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003
- Boer Mauna, *Organisasi-Organisasi Internasional*, Badan Litbang Departemen Luar Negeri, 1998
- Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, CV. Remadja Karya Bandung, 1984
- Kuncoro Mudrajad, *Analisis, APEC dan Kepentingan Indonesia*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yogyakarta, 2007
- Matthias Lutz, *The Effects of Volatility in The Terms of Trade on Output Growth*, New York, World Development 22, 1994, hlm. 1959-1975
- Michel Todaro, *Pembangunan Ekonomi Dunia Ke Tiga*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Mochtar Kusuma Atmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, 1982
- Mohammed Badjauni, *International law Achievement and propect*, UNESCO, Paris, 1997
- Natalia Santi, *Indonesia Belum Mampu Memanfaatkan Fasilitas Bisnis APEC*, Harian Umum Sore, Rabu 14 maret 2007
- Oppenheim, L, *International Law*, Vol 1, Longmans, Green and CO, London-New York

Ridiani Kurnia, *Workshop: "APEC Dipersimpangan Jalan"*, 2005, Departemen Luar Negri, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Sumaryono Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional*, UI Press, Jakarta, 1990

Trade Management and Development Institute, *Tinjauan Perdagangan Dunia*, 2001

KORAN/MAJALAH/JURNAL

Djoni Muhammad, 2009, "*Imigrasi Sosialisasikan ABTC*", Jawa Pos, 18 Desember 2009

Departemen Luar Negri Republik Indonesia, 2007, "*Pengusaha Nasional Kurang Manfaatkan Kartu Perjalanan Bisnis APEC (ABTC)*", Jurnal Departemen Luar Negri Republik Indonesia, Jakarta, 2007

INFORMASI ELEKTRONIK

Hassan Wirajuda, "*Dialog Pemerintah - Swasta untuk Mendorong Fasilitas Perdagangan dalam Kerangka APEC*", Hotel Borobudur, Jakarta, www.deplu.go.id diakses 12 Maret 2007

Ruang Lingkup Perjanjian APEC, diupdate dari <http://www.apec.org> dan sekretariat APEC <http://www.apecsec.org.sg> diakses tanggal 17 November 2009

Prinsip Umum Kerjasama APEC, diupdate dari

www.wartawarga.gunadarma.ac.id diakses tanggal 17 November 2009

APEC Bussiness Travel Card, diupdate dari [www.http://itpcsydney.com](http://itpcsydney.com), diakses tanggal 6 Februari 2008

Tindakan WTO terhadap Kebijakan Indonesia tentang Mobil Nasional "Timor",

Diupdate dari <http://one.indoskripsi.com>, diakses tanggal 22 Oktober 2009

AFTA dan Implementasinya, diupdate dari <http://www.depdag.go.id/afta>, diakses tanggal 25 Januari 2011

Kebijaksanaan Umum dan Politik Luar Negeri RI - Uni Eropa (UE), diupdate dari

<http://www.deplu.go.id/RI-UE>, diakses tanggal 25 Januari 2011

Manfaat Perdagangan APEC, didistribusikan oleh Biro Program Informasi

Internasional, Departemen Luar Negeri AS, diupdate dari:

[Http://www.america.gov](http://www.america.gov), diakses tanggal 15 Januari 2010

Kartu Perjalanan Pebisnis APEC, diupdate dari www.wikipedia.org/APEC-

Bussiness Travel Card, diakses tanggal 17 Januari 2011

Analisis Implementasi KPP APEC pada Ekonomi Indonesia sebagai sebuah

Kebijakan, diupdate dari <http://eprints.ui.ac.id>, diakses tanggal 25 Januari

2011

Syarat-syarat Permohonan dan Ketentuan ABTC di Indonesia, diupdate dari

<http://www.imigrasi.go.id>, dan kpp.apec@imigrasi.go.id, diakses tanggal

15 November 2009

PERATURAN INTERNASIONAL

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional

Bogor Goals Tahun 1994 tentang Deklarasi APEC di Bogor tahun 1994

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan ABTC untuk

Warga Negara Indonesia

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan HAM Tahun 2003 tentang
Pemberlakuan ABTC sejak 1 Mei 2004

Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-0378.UM.01.10 tahun 2004
tentang tata cara penerbitan dan Pembatalan Kartu Perjalanan Pebisnis
Asia Pacific Economic Cooperation, Pelaksanaan dan Pembatalan *Pre
Clearence*, serta Pelayanan Keimigrasian di tempat Pemeriksaan Imigrasi
Direktur Jenderal Imigrasi

APEC Business Travel Card
Philippines

AUS CHL HKG KOR MYS NZL
PHL



Volume
103

115

44

44

Document No
000000112

Export Date
27 Oct 03

CPPHLD0000011220<<PHL2Z047161<
3812099M0310273PHL20040412<<<5
ROMULO<<ROBERTO<<<<<<<<<<<<<<

A photograph of a busy airport terminal. In the foreground, a large sign with a white arrow points left, with 'APEC' and 'AUGUST 1994' written above it. Below the arrow is a sign that says 'DIPLOMAT OFFICIAL'. To the left, a person is standing behind a counter. In the background, there are several other signs, including 'PRIORITY', 'AFTC', and 'AFTC'. The terminal has a modern design with curved ceilings and large windows.